



LAPORAN KEGIATAN **BIMBINGAN TEKNIS** DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tema :

**“SINERGI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN OPTIMALISASI PAD DALAM
PENYUSUNAN RAPERDA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ”**

**Tanggal, 11 s.d 14 Mei 2026
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

UNIVERSITAS AKI

SEMARANG

2026



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tema :

**“SINERGI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN OPTIMALISASI PAD DALAM
PENYUSUNAN RAPERDA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

**Tanggal, 11 s.d 14 Mei 2026
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta perangkat daerah dalam mengintegrasikan kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi PAD, khususnya dalam proses penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan, mulai dari latar belakang, tujuan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan serupa di masa yang akan datang, guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Semarang, Mei 2026
Kepala LPPM,



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar -----	I
Daftar Isi -----	II
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	3
C. Dasar Hukum -----	3
BAB II RENCANA KEGIATAN -----	5
A. Organisasi Penyelenggara -----	5
B. Waktu dan Tempat -----	5
C. Tema dan Materi -----	5
D. Narasumber -----	5
E. Metode dan Teknik Pembelajaran -----	6
F. Pembiayaan -----	6
G. Sertifikat -----	6
BAB III REALISASI KEGIATAN -----	7
A. Susunan Acara Pembukaan -----	7
B. Susunan Acara Penutupan -----	8
C. Peserta -----	8
D. Tindak Lanjut -----	8
E. Sarana dan Prasarana -----	10

BAB	IV	EVALUASI KEGIATAN -----	11
BAB	V	PENUTUP -----	19
Lampiran – lampiran			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu indikator penting dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. Tingginya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi PAD, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem pengelolaan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah.

Di sisi lain, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Raperda LKPD) merupakan bagian krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Raperda LKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan daerah yang mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun dalam praktiknya, penyusunan Raperda LKPD masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta kendala dalam pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.

Selain itu, dinamika regulasi yang terus berkembang serta tuntutan peningkatan kualitas laporan keuangan, termasuk dalam rangka memperoleh opini terbaik dari lembaga pemeriksa, menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Proses penyusunan dan pembahasan Raperda LKPD juga memerlukan ketelitian, ketepatan waktu, serta sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, diperlukan upaya strategis melalui peningkatan kapasitas, pemahaman regulasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting guna mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan kualitas penyusunan Raperda LKPD, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta dalam menyinergikan kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi PAD dalam penyusunan Raperda LKPD.
2. Memahami kebijakan dan regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan pemahaman tentang peran PAD dalam struktur keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan Raperda LKPD.
5. Mengoptimalkan peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
6. Mendorong sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

A. Organisasi Penyelenggara

Nama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang.

B. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

C. Tema dan Materi

Tema Bimbingan Teknis **"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"**

Materi :

1. Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD
3. Komunikasi Publik dan Media Handling
4. Focus Group Discussion (FGD)

D. Narasumber

Narasumber Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Rino Rio Kent, S.STP., MM. (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
2. Berlian Thaeba Noevus, C.PS. (Public Speaking Trainer)

E. Metode dan Teknik Pembelajaran

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Bimbingan Teknis ini adalah :

1. Ceramah ; penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai dengan topik yang disampaikan
2. Diskusi dan Tanya Jawab ; peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber sehingga penyajian menjadi dinamis, menarik dan interaktif sehingga tidak membosankan.

F. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026, dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

G. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas AKI dengan nomor registrasi Sertifikat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mana sertifikat yang dimaksud pada halaman depan bertandatangan Rektor Universitas AKI dan halaman belakang bertandatangan Kepala LPPM Universitas AKI.

BAB III

REALISASI KEGIATAN

A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Bimbingan Teknis “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dibuka pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebanyak 49 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Do'a
4. Sambutan – sambutan :

Pertama : Rektor Universitas AKI

(Ibu Prof. Dr. Tri Purwani, SE., MM.)

Pertama : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

(H.R. Bambang Irawan, S.H., S.Sos., M.M.)
5. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
6. Foto Bersama
7. Penutup

B. Susunan Acara Penutupan

Kegiatan Bimbingan Teknis “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ditutup pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penutupan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Ibu Hj. Tenny Juliawaty, S.E., M.Si.
3. Penutupan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis
4. Foto Bersama
5. Penutup

C. Peserta

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. (Daftar hadir terlampir).

D. Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan kegiatan Bimbingan Teknis, para peserta dibekali oleh seluruh makalah dan materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tidak lanjut (action plan).

Berikut rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam rangka penyelarasan kebijakan keuangan daerah dengan penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pendampingan teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi hasil bimbingan teknis.
3. Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun langkah strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
5. Melakukan percepatan penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan regulasi yang berlaku.
6. Menguatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Menindaklanjuti hasil rekomendasi narasumber dan hasil diskusi peserta sebagai bahan penyempurnaan kebijakan serta perbaikan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
8. Mendorong terciptanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung optimalisasi PAD dan pembahasan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara efektif dan tepat waktu.

E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan di Hotel Grand Karlita Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Akomodasi

Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang nyaman bagi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan konsumsi yang baik bagi peserta.

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD *projector*, *sound system*, *Flip Chart*, alat tulis untuk peserta, dan fotocopy materi bahan ajar.

3. Seminar Kit

Peserta Bimbingan Teknis mendapatkan fasilitas Seminar Kit.

BAB IV HASIL EVALUASI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Mei 2026

Nomor : B/800.2.4.6/575/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Yth. Ketua LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI)
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang di Hotel Grand Karlita Purwokerto, mulai tanggal 11 sampai dengan 14 May 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dalam kategori **Cukup Memuaskan**, dan **Dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	77,60	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM
2	Layanan Administrasi	76,56	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,78	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM
Rata-rata.....		76,65	Cukup Memuaskan	3,07	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Periode 11 s.d. 14 Mei 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Periode : 11 s.d 14 Mei 2026

Jumlah Peserta : 48 orang

Jumlah Responden : 48 orang

Tanggal Evaluasi : 13 Mei 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 76,65 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3,07 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Materi harus disesuaikan dengan kondisi lokal Kab. Purbalingga
- b) Efisiensi waktu, kurang on time
- c) Materi untuk lebih tajam dan detail
- d) Bimtek selanjutnya untuk lebih ditingkatkan
- e) Materi untuk dipertajam ke pertanggungjawaban APBD

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**
 Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	12/05/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	UNAKI - Bimtek Dewan Kabupaten Purbalingga
LOKASI PELAKSANAAN	Hotel Grand Karlita Purwokerto

RESUME KESELURUHAN		REKAPITULASI PER ASPEK		
Rata-rata	76,65			
Rata-rata	3,07			

Jumlah Responden	48
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	77,60	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM
2	Layanan Administrasi	76,56	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	75,78	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM
	Rata-rata	76,65	Cukup Memuaskan	3,07	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	48	0	2	37	9	78,65	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM	95,83%	4,17%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	48	0	1	40	7	78,13	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM	97,92%	2,08%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	48	0	2	42	4	76,04	Cukup Memuaskan	3,04	DBCM	95,83%	4,17%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	48	0	2	41	5	76,56	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	95,83%	4,17%
		2.2 Sistem registrasi peserta	48	0	2	42	4	76,04	Cukup Memuaskan	3,04	DBCM	95,83%	4,17%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	48	0	2	40	6	77,08	Cukup Memuaskan	3,08	DBCM	95,83%	4,17%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	48	0	2	44	2	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	95,83%	4,17%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	48	0	2	43	3	75,52	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	95,83%	4,17%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	48	0	2	42	4	76,04	Cukup Memuaskan	3,04	DBCM	95,83%	4,17%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	48	0	2	41	5	76,56	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	95,83%	4,17%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Materi harus disesuaikan dengan kondisi lokal Kab. Purbalingga
- 2 Efisiensi waktu, kurang on time
- 3 Materi untuk lebih tajam dan detail
- 4 Bimtek selanjutnya untuk lebih ditingkatkan
- 5 Materi untuk dipertajam ke pertanggungjawaban APBD

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

BAB V PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumentasi atas seluruh rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta kemampuan dalam menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga proses penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, peserta, panitia pelaksana, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Semoga hasil dari kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat menjadi pedoman dan bahan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.



SURAT PENAWARAN

Nomor : 007/PT/LPPM-UNAKI/IV/2026
Lampiran : Proposal Kegiatan
Perihal : **Penawaran Bimbingan Teknis**

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersama surat ini kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat ijin dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No. 895.3/6164/BPSDM, Tanggal 02 Desember 2020 yang telah diperbaharui dengan surat ijin No. 895.3/7200/BPSDM, Tanggal 19 Agustus 2022 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas, Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : **“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Kamis
Tanggal : 11 – 14 Mei 2026
Tempat : Hotel **“Grand Karlita”** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 21 April 2026
Kepala LPPM,



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Tembusan :
1. Rektor Universitas AKI
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
3. Arsip



JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 11 s.d. 14 Mei 2026 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
14.00 – 18.00	Chek – In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 – 21.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
21.00 -	Istirahat	-	Panitia & Peserta

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 - 08.00	UPACARA PEMBUKAAN : <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Do'a- Sambutan Rektor Universitas AKI- Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga- Foto Bersama- Penutup	-	Universitas AKI Ketua DPRD
08.00 – 11.45	Materi 1 : Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	5	Rino Rio Kent, S.STP., MM. (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
11.45 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	Materi 2 : Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD	5	Rino Rio Kent, S.STP., MM. (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 – 11.15	Materi 3 : Komunikasi Publik dan <i>Media Handling</i>	5	Berlian Thaeba Noevus, C.PS. (Public Speaking Trainer)
11.15 – 13.30	Istirahat – Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 – 17.15	Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)	5	Pimpinan DPRD/Universitas AKI

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 – 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 – 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan PENUTUPAN	-	Pimpinan DPRD Universitas AKI
11.00 – 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

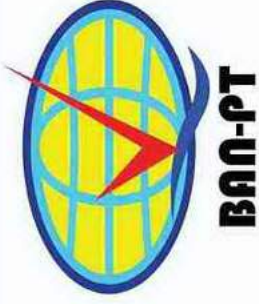
* **Note :**

JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)

Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan



AKREDITASI UNIVERSITAS



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan bahwa

Universitas Aki, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Maret - 2024 sampai dengan 20 Maret 2029



Jakarta, 5 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT PENUNJUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Onje No. 2A ☎ (0281) 891058 Fax. (0281) 895052
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 4 Mei 2026

Nomor : 175/ 903 /2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyelenggaraan Bintek
Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.
Kepala LPPM Universitas AKI
Semarang
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 007/PT/LPPM-UNAKI/IV/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 50 (Lima puluh) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah Hari Senin s.d. Kamis tanggal 11 s.d 14 Mei 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY SURYONO, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199001 1 002

Tembusan:

Yth. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga



**SURAT
PERUBAHAN
JUMLAH PESERTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Onje No. 2A ☎ (0281) 891058 Fax. (0281) 895052
PURBALINGGA

53311

Purbalingga, 7 Mei 2026

Nomor : 175/1002/2026

Lampiran : -

Perihal : Ralat Jumlah Peserta Bintek
DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.

Ketua LPPM Universitas AKI

Semarang

di-

SEMARANG

Dengan hormat, merujuk surat kami Nomor: 175/903/2026, tanggal 4 Mei 2026 Perihal Penyelenggaraan Bintek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 11 s.d. 14 Mei 2026 di Purwokerto dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Namun demikian, 1 (satu) orang Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga dalam waktu yang bersamaan menjalankan tugas lain sehingga tidak dapat mengikuti Bintek tersebut yaitu:

Nama : H. Aman Waliyudin, SE, M.S.I.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

Fraksi : Partai Kebangkitan Bangsa.

Adapun sejumlah 49 (Empat puluh sembilan) Peserta dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang lain dapat mengikuti Bintek sesuai dengan ketentuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY SURYONO, S. Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680829 199001 1 002

Tembusan:

Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga



**SURAT
PERJANJIAN
KERJASAMA
(MOU)**



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AKI**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor Setwan : 560/904/V/2026
Nomor Unaki : 009/PT/LPPM-UNAKI/V/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., MM.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jl. Onje No. 2A Purbalingga 53311



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.**
Jabatan : Kepala LPPM Universitas AKI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3
PESERTA

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024 - 2029.

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN



Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
 - b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.

Halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An. UNIVERSITAS AKI.
 - d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
 - e. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
 - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
 - c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
 - e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
 - f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Senin s.d Kamis tanggal 11 - 14 Mei 2026 di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.



Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY SURYONO, S.Sos., MM.
NIP. 19680829 199001 1 002

PIHAK KEDUA
KEPALA LPPM UNIVERSITAS AKI

ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



**SURAT
PERMOHONAN
REKOMENDASI**



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : universitasaki@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 208/SM/REK/UNAKI/V/2026
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring**

Kepada Yth.
**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**
Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin s.d Kamis
Tanggal : 11 – 14 Mei 2026
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
Jumlah : 50 Orang
Tempat Pelaksanaan : Hotel “**Grand Karlita**” Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto
Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 04 Mei 2026
Rektor,

Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.
NIDN. 0609027101

Tembusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip



**SURAT
REKOMENDASI
BPSDMD**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 07 Mei 2026

Nomor : 893/PT11/1165.510/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan
Dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga

Rektor Universitas AKI
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 208/SM/REK/UNAKI/V/2026, tanggal 04 Mei 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 14 Mei 2026 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b. Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD;
 - c. Komunikasi Publik dan Media Handling;
 - d. Focus Group Discussion (FGD);
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Purbalingga;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
-



DAFTAR HADIR PESERTA


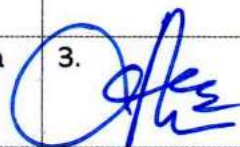
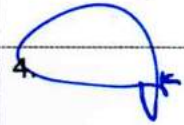
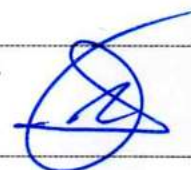
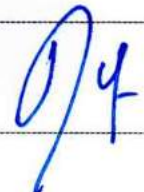




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
 Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
 Jam : 14.00 – 18.00 WIB
 Acara : Cek In & Registrasi Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11.	
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12.	
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13.	
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14.	
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15.	
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16.	
17.	SLAMET	Anggota	17.	
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18.	
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19.	
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20.	
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21.	
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22.	
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23.	
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24.	
25.	H. SAHLAN	Anggota	25.	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 


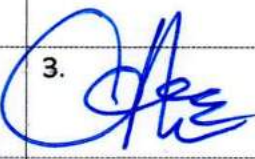
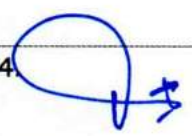
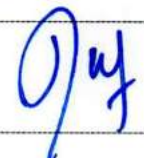
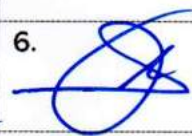


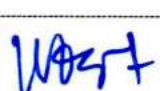

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
 Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
 Jam : 07.30 – 11.45 WIB
 Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN
 (Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)
 Materi 1 : Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	SLAMET	Anggota	17. 
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18. 
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19. 
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20. 
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21. 
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22. 
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23. 
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24. 
25.	H. SAHLAN	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 


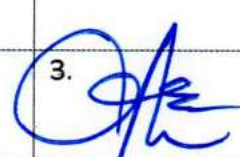
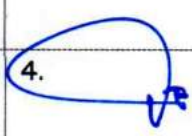
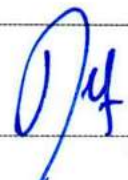
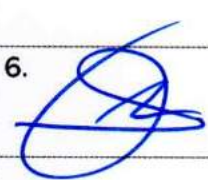



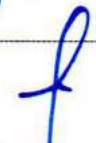
DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
 Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
 Jam : 13.30 – 17.15 WIB
 Materi 2 : Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD
 Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	SLAMET	Anggota	17. 
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18. 
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19. 
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20. 
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21. 
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22. 
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23. 
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24. 
25.	H. SAHLAN	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
 Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026
 Jam : 07.30 – 11.15 WIB
 Materi 3 : Komunikasi Publik dan *Media Handling*
 Narasumber : Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3.	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5.	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7.	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	SLAMET	Anggota	17. 
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18. 
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19. 
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20. 
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21. 
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22. 
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23. 
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24. 
25.	H. SAHLAN	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 



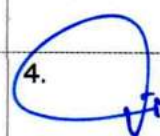
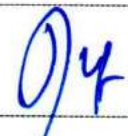
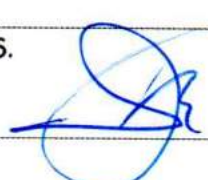
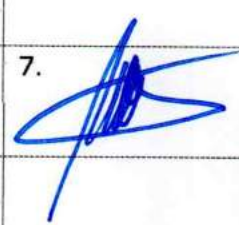

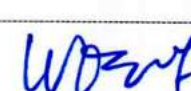

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026
Jam : 13.30 – 17.15 WIB
Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)
Fasilitator : Pimpinan DPRD/Universitas AKI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	SLAMET	Anggota	17. 
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18. 
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19. 
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20. 
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21. 
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22. 
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23. 
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24. 
25.	H. SAHLAN	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 



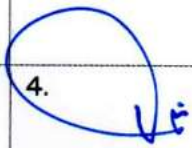

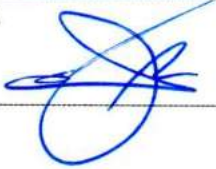
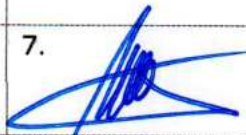


DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
 Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

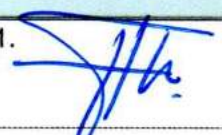
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2026
 Jam : 09.00 – 11.00 WIB
 Acara : Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan
PENUTUPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2.
3.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Wakil Ketua	3. 	
4.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		4. 
5.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	5. 	
6.	KARSENNO, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota	7. 	
8.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		8. 
9.	WURIYATI, A.Md.	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 
12.	ANDHIKA WISNU MOYO	Anggota	12. 
13.	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	Anggota	13. 
14.	NURANI DIAH PERMATASARI	Anggota	14. 
15.	AGUS PRIYANTO	Anggota	15. 
16.	H. KATNO, S.T.	Anggota	16. 
17.	SLAMET	Anggota	17. 
18.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	18. 
19.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota	19. 
20.	H. HAMID, S.H.	Anggota	20. 
21.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota	21. 
22.	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes.	Anggota	22. 
23.	Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.	Anggota	23. 
24.	Hj. ERLIYATI, S.E.	Anggota	24. 
25.	H. SAHLAN	Anggota	25. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	CAHYO SUSILO, A.Md., RO	Anggota		26. 
27.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota	27. 	
28.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		28. 
29.	NIKEN HINDRIANINGSIH	Anggota	29. 	
30.	PADANG KUSUMO, S.H.	Anggota		30. 
31.	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	Anggota	31. 	
32.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		32. 
33.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	33. 	
34.	ADI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		34. 
35.	UUT TRIAS YANUAR	Anggota	35. 	
36.	IDRUS ANJASMORO, A.Md	Anggota		36. 
37.	H. ADI YUWONO, S.H.	Anggota	37. 	
38.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota		38. 
39.	MUGI WAHYUDI, S.AP	Anggota	39. 	
40.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	Anggota	41.	
42.	SARJONO, S.Pd., M.Si.	Anggota		42. 
43.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	43.	
44.	SUHARTO, S.H.	Anggota		44. 
45.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota	45.	
46.	H. IN'AM BIROHMATILLAH	Anggota		46. 
47.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	47.	
48.	SUNARKO, S.H.	Anggota		48. 
49.	PREDI SETIAJI, S.H.	Anggota	49.	
50.	H. KHODIRIN, S.H.	Anggota		50. 



DAFTAR HADIR NARASUMBER





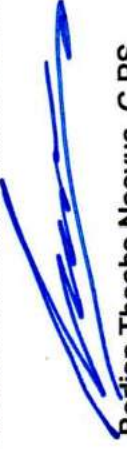
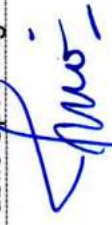
UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lpdm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Selasa, 12 Mei 2026	Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	 Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD		 Rino Rio Kent, S.STP., MM. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Rabu, 13 Mei 2026	Komunikasi Publik dan <i>Media Handling</i> Focus Group Discussion (FGD)	 Berlian Thaebe Noevus, C.PS. Public Speaking Trainer  Universitas AKI



BIODATA NARASUMBER



BIODATA NARASUMBER

Nama : Rino Rio Kent S. S.TP., MM.

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 20 Maret 1991

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Kementerian Dalam Negeri RI

Jabatan : Analis Kebijakan Sub Koordinator Wilayah IV Dit Perencanaan Anggaran

Daerah

No. Telp/Hp. : 0853 2225 0578

Alamat : Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat

Purwokerto, 12 Mei 2026

Rino Rio Kent S. S.TP., MM.



BIODATA NARASUMBER

Nama : Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Public Speaker

Jabatan : -

No. Telp/Hp. : 0896 0188 3610

Alamat : Purwokerto - Banyumas

Purwokerto, 13 Mei 2026

Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

BERLIAN THAEBE NOEVUS., C.PS

Bang Bebe

bebeberlian17@gmail.com - 0896 0188 3610

DESKRIPSI DIRI/TENTANG SAYA

Seorang Public Speaker, content creator public speaking semenjak tahun 2021 dan membentuk personal branding hingga sekarang mencapai followers social media 120.000+. MC All event dan running bisnis digital creative agency.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Olahraga | 2016
2. Lurah Pondok Pesantren/ Pimpinan Madrasah Mathoniyah Islamiyah
3. Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Dakwah | 2018
4. Ketua Bidang Olahraga IPMAWI (OSIS) | 2019
5. Ketua Pramuka (Pradana) 2019
6. Komandan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) 2019 –
7. Ketua Bidang Riset Pengembangan dan Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2021
8. Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa UMP
9. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UMP
10. Pimpinan Dewan Kehormatan DPM KM UMP
11. Ketua Bidang Kader IMM KEB
12. President Komunitas Trainer Pemula
13. Relawan MRI Banyumas
14. Pengurus SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah)

PENGALAMAN KERJA

1. Jualan Online reseller shopee tahun 2019
2. Jualan wedang uwuh tahun 2020
3. Jualan sriping, susu kedelai dan makanan ringan lainnya tahun 2021
4. Kepala pemasaran di CV Alvarel Technology Indonesia tahun 2022
5. Guru TK Aisyiyah 2 dan 7 purwokerto tahun 2022-2023
6. Guru ngaji tahun 2023
7. Marketing dan content creator di bimbel OSC purwokerto tahun 2023
8. CEO CV Bangkit Edukasi Indonesia tahun 2024

PENGALAMAN SPEAKER

Tahun 2020

1. Webinar Berliankan Omzetmu tahun
2. Kajian Anak Saleh

Tahun 2022

1. Coaching How to Upgrade Public Speaking Skill For your Best Version DPM FEB UMP
2. CTC Talks Upgrade Your Value By Public Speaking
3. Webinar Quarter Life Crisis “Terjebak Dalam Zona Nyaman”
4. Seminar Motivasi Connecting With Santri Ponpes Zamzam Cilongok
5. Live Bincang Pengembangan Diri
6. Public Discussion Cara mengatasi kecemasan Untuk menjadi Pembicara yang Hebat Dengan Mengenal Diri Sendiri
7. Class Public Speaking dan Mental Helath Kopma Lebah UMP

Tahun 2023

1. Mentoring Trainer Muda di Komunitas Training Pemula
2. Live Makin Trending dengan personal branding di Social Tribes
3. Career Talk Bongkar Rahasia Naikin Followers 10k++ dan dapetin cuan dari SOSMED dalam waktu 7 hari
4. Live Cara Jago Public Speaking
5. Webinar Public Speaking Rahasia PEDE Ngomong di Depan Banyak Orang
6. Webinar Presentation Skill Program Sejuta Pembicara
7. Latihan keterampilan Manajemen Mahasiswa di Universitas Al Irsyad Cilacap
8. BTLMO Leadership in action, Its not position di Stikes Surya Global Yogyakarta
9. Public Speaking class Pesantren Ramadhan Kreatif di Yatim Mandiri
10. Webinar Public Speaking dan Desain Grafis DPM FE Untidar
11. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
12. After Sales WEBINAR Nongkrong Bareng UPSACADEMY
13. Kader Academy “Bongkar Rahasia Jago Public Speaking. Ilmu yang jarang Disebar Oleh Orang Lain
14. Private Class Public Speaking Libria
15. Private Class Public Speaking Ratri
16. Private Class Public Speaking Siti dan masih banyak 10 lainnya
17. Public Speaking Class UPSACADEMY
18. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
19. LAMO (Latihan Administrasi dan Manajemen Organisasi) IMM KIP UMP
20. Webinar Jago Public Speaking Anti Overthinking Dunia Kampus.id
21. Webinar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat UKM Mustika
22. Motivation day di Panti Darmo Yuwono
23. Webinar Public Speaking Universitas Jember
24. Seminar Motivasi Refleksi Milad IPM ke 62 Zamzam cilongok
25. Kelas Exclusive Public Speaking UPSACADEMY
26. Public Speaking Class SD Karangkemojing
27. Public Speaking Class di Bogor untuk SMP Al Isyad Kelapa Gading
28. Seminar Social Media di Amikom Celebrate Purwokerto
29. Pelatihan Manajemen Organisasi di Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus 7
30. Seminar dan Workshop Public Speaking MAFAZA Grendeng Purwokerto

31. Kelas persidangan DPM FTS UMP
32. Manajemen Organisasi PC IPM Cilongok
33. Morning Wak KOMPAS TV
34. Kelas Public Speaking Cunang Bogor untuk SMA Bekasi
35. Webinar Public Speaking pembekalan yac.id pelopor inspiratif
36. Webinar Public Speaking Bersama Veren Saraisang, S.Pd.
37. Pelatihan Public Speaking untuk Kesiapan Karir di Masagi Training and Consulting
38. Kelas Public Speaking SMP 38 Bekasi
39. Public Speaking Tour School SMA Al Irsyad Purwokerto
40. DAD IMM KIP Strategi Influencer

Tahun 2024

1. Pelatihan Sidang KM FEB UMP
2. Webinar Public Speaking UPSACADEMY
3. DAD IMM Purbalingga Social Media
4. Kelas Public Speaking LDK pengurus OSIS dan MPK SMP 2 Kembaran
5. Kelas Komunikasi dan Public Speaking UPSACEDEMY
6. Bongkar Cara Presentasi yang Elegan dan Tidak Belibet UPSACADEMY
7. BCE Talkshow di Andhang Pangrenan Purwokerto
8. Public Speaking Tour School MTs WI Kebarongan
9. Public Speaking di BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah
10. Public Speaking Class SMPN 1 Kembaran
11. Public Speaking Class di SMP Telkom Purwokerto
12. Webinar Upgrading Kepemimpinan, Self Capability dan Public Speaking
13. Webinar Public Speaking Klintan Methaphoria
14. Public Speaking Class Banyumas Leadership Project
15. Motivasi & Talkshow IKAPMAWI EXPO
16. Motivation Class Pondok Modern Al Madina MBS Pingit- Banjarnegara
17. Training Motivation Upgarade Diri Menggapai Mimpi dan Cita Cita SMP IT Harapan Umat Purbalingga
18. Motivation & Inspiration kelas VII Putra SMP Al Irsyad
19. Motivation & Inspiration kelas VII Putri SMP Al Irsyad
20. National Public Speaking Class DEMA FDK UIN Saizu

PENGALAMAN MASTER OF CEREMONY

Tahun 2021

1. MASTA FEB UMP

Tahun 2022

1. MASTA UMP
2. Konser Feby Putri

Tahun 2023

1. Pembekalan mentoring FEB UMP
2. Semarak MILAD PC IMM Banyumas
3. Wedding Vira
4. Wedding Azhar
5. MASTA FEB UMP
6. Seminar Nasional Indonesia Youth Movement
7. Islamic Fair UMP
8. Seminar Nasional Young Entrepreneur Summit

Tahun 2024

1. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Kembaran
2. Outbound game ZONA Koordinator Bidan Se Purbalingga
3. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilongok
4. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Purbalingga
5. Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilacap
6. dll

PENDIDIKAN

1. SDN Margajaya Ngamprah Bandung Barat
2. MTs WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
3. MA WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
4. Universitas Muhammadiyah Purwokerto

SKILL

- Content Creation
- Leadership
- Digital Marketing
- Host
- MC
- Speaker
- Game Master Outbound
- Teaching
- Public Speaking
- Critical Thinking



DAFTAR HADIR MODERATOR



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang



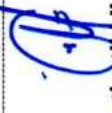

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : ippm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 12 Mei 2026

HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
Selasa, 12 Mei 2026	Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	 <u>Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos</u> Moderator
	Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD	 <u>Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos</u> Moderator
	Komunikasi Publik dan <i>Media Handling</i>	 <u>Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos</u> Moderator
Rabu, 13 Mei 2026	Focus Group Discussion (FGD)	 <u>Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos</u> Moderator



BIODATA MODERATOR



BIODATA MODERATOR

Nama : Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Januari 2021

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Master Of Ceremony & Moderator

Jabatan : -

No. Telp/Hp. : 081220050055

Alamat : Purwokerto

Purwokerto, 13 Mei 2026

Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos

Curriculum Vitae

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001



TENTANG SAYA

Seorang public speaker berpengalaman dengan keahlian dalam menginspirasi audiens dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Terbukti memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan berbagai jenis publik.

FOUNDER BERANI BERBICARA CLASS PURWOKERTO

081220050055

NYONYAGABUT@GMAIL.COM



PENGALAMAN KERJA

1. PUBLIC RELATION FEST MANAGEMENT SURABAYA

2023 - 2024

2. Content Creator PT Refo Digital Kreatif Talent Koordinator PT Refo Digital Kreatif

2024 - 2025



PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Komplek Ponpes Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019
2. Koordinator Ekstrakurikuler OSIS SMA Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019
3. Koordinator Advokasi dan Komunikasi HMJ KPI UIN SAIZU 2021/2022
4. Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DEMA Fakultas Dakwah UIN SAIZU 2022/2023
5. Wakil Ketua 1 PMII Rayon Dakwah 2022/2023 UIN SAIZU PURWOKERTO
6. Ketua Umum Komunitas Motivator UIN SAIZU 2021 UIN SAIZU PURWOKERTO



RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI DARUL HIKMAH PURWOKERTO BARAT
- SMP takhassus al - qur'an kalibeber, wonosobo
- SMA AL - HIKMAH 2 SIRAMPOG BREBES
- S1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM UIN SAIZU PURWOKERTO



Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001



1. MC Bank Indonesia Purwokerto 2021
2. Pembicara Closing PBAK FAKDA 2021 "Motivasi Maba"
3. Pembicara Content Creator Faktapala UIN SAIZU Purwokerto 2021
4. Pembicara Sosialisasi penting melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Satap Pagedongan Banjarnegara
5. Guest Speak #milenialproduktif Samarinda "Menjadi Public Speaker terbaikmu" 2022
6. Pembicara Seminar Motivasi Santri di Ponpes Darul Falah Purwokerto
7. Pembicara Workshop Digitalisasi di Lumbir 2023
8. Pembicara Seminar Motivasi "Mental Awareness" SMPN 3 Pulosari Pemalang
9. Pembicara pelatihan "Digital Marketing" di Pemalang 2023

10. Pembicara "Pelatihan Public Speaking" di UIN Saizu Purwokerto 2023
11. Pembicara Seminar "Woman Milenial" Dema Syariah UIN Saizu Purwokerto 2023
12. HOST KONSER NDX AKA di Terminal Bulupitu Purwokerto, 2023
13. MC Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF), di Hotel Aston Purwokerto 2024
14. Pembicara Sosialisasi "Kesehatan Mental Remaja SMP" SMNP 2 Susukan Banjarnegara 2024
15. Pembicara "Green Self Care" Talkshow Motivasi Purwokerto 2024
16. Pembicara Seminar "Public Speaking" UIN SAIZU Fakultas Bisnis Islam 2024
17. Pembicara "PBAK UIN SAIZU 2024" Motivasi Mahasiswa Baru, 2024
18. Pembicara "Personal Branding" SMA Ma'arif Karangmoncol Purbalingga, 2024
19. MC "Meet and Share Kopdar Pebisnis Purbalingga" by Kiriminaja 2024
20. HOST "Konser Parade Hujan" Diesnatalis UIN SAIZU Purwokerto 2024
21. Pembicara "Workshop. Media Kreativitas Muda Digitalisasi" UIN SAIZU 2024
22. MC "HUT Boersa Kampus" Purwokerto 2024
23. MC "Malam penganugerahan KPU Banyumas & KPU Provinsi Jawa Tengah" 2025
24. Pembicara "Pelatihan Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Purbalingga" 2025
25. Pembicara "Pelatihan Modetator Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Cilacap" 2025



Public Speaking Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001



- 26. Pembicara Pelatihan Master Of Ceremony BBC Purwokerto 2025
- 27. MC InstaMeet Media SePurwokerto 2025
- 28. Pembicara pelatihan digital marketing DiFabel seDKI Jakarta 2025
- 29. MC Program Si Iklas Difabel Setara Sandianga Uno Jakarta 2025
- 30. Pembicara Pelatihan Videografer Difabel SeDKI Jakarta 2025
- 31. Pembicara Pelatihan Tiktok Affiliate Difabel Tangerang Selatan
- 32. MC Peresmian Studio Kreatif Sandianga Uno Voffice Jakarta Dll
- 33. Moderator PKKMB UMP 2025
- 34. Pembicara Pelatihan Public Speaking Fakultas Peternakan Unsoed 2025
- 35. Juri KPI Go Talent Comfest Uin Saizu 2025
- 36. Pembicara Training Motivator Komunitas Uin Saizu Purwokerto 2025
- 37. MC Pelatihan Digital Marketing Difabel Sandianga Uno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta
- 38. Trainer Pelatihan Content Creator Difabel Sandiangauno Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta, DL





KOMPILASI MATERI

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA



MATERI

**Struktur dan Penyusunan Raperda
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Rino Rio Kent, S.STP., MM.
(Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**



FUNGSI DPRD DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGKA PENGAWASAN



KEPALA DAERAH

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

Pasal 65 UU 23/2014

DPRD

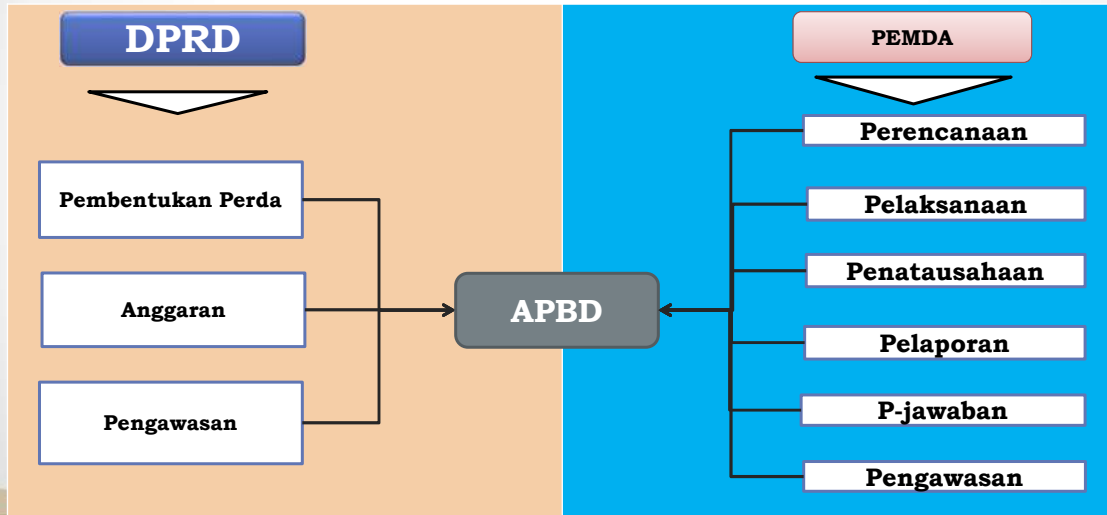
membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, **melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda** dan APBD kabupaten/kota;

Pasal 154 UU 23/2014





PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



RUANG LINGKUP PENGAWASAN DPRD





JADWAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	Minggu kedua bulan Juni	
2.	Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dari pengguna anggaran ke PPKD	7 hari kerja setelah semester pertama berakhir	
3.	Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuda	Minggu kedua bulan Juli	
4.	Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari Sekda kepada Kepala Daerah	Minggu ketiga bulan Juli	
5.	Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari Kepala Daerah kepada DPRD	Akhir bulan Juli	
6.	Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD	2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Februari
7.	Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Maret
8.	Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir bulan Maret
9.	Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	2 bulan setelah disampaikan	Bulan Mei
10.	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir bulan Juni



JADWAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
11.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK	1 bulan setelah disampaikan	Akhir bulan Juli
12.	Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja	
13.	Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	Paling lama 15 (limabelas) hari kerja	
14.	Kepala Daerah dan DPRD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	
15.	Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Awal Agustus



Pelaporan Keuangan

- Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

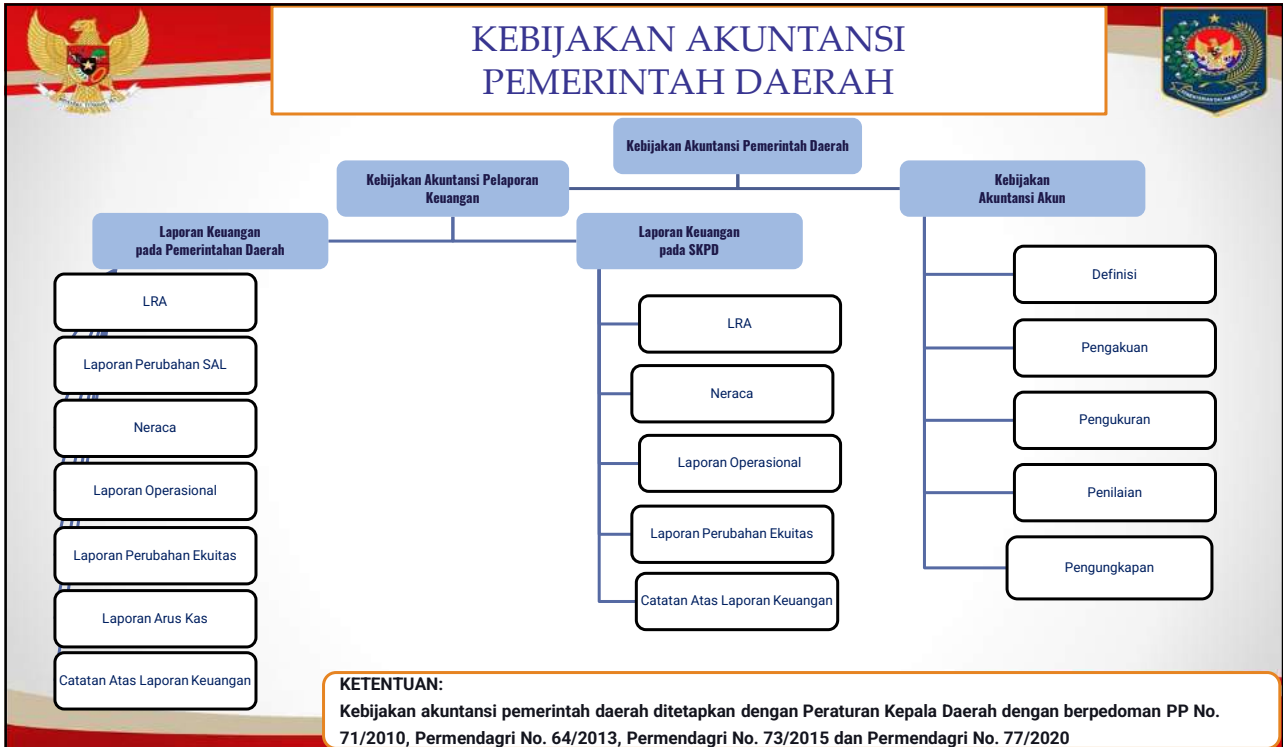
Laporan Operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Catatan atas laporan keuangan



Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir



- Pasal 17 UU 15/2004**
- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.



Pengawasan **DPRD** terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD ?

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.





LANGKAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH



1. **Kesesuaian** Laporan Keuangan yang disusun dengan **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**
2. **Kesesuaian** Laporan Keuangan **SKPD** dengan Laporan Keuangan **Pemda**
 - Lapkeu Pemda pada dasarnya merupakan kompilasi atas lapkeu SKPD
 - Perlu dilakukan rekonsiliasi antara data SKPD dengan data di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu:
 - ✓ Rekonsiliasi data realisasi pendapatan
 - ✓ Rekonsiliasi data realisasi belanja
 - ✓ Rekonsiliasi data aset tetap
3. **Kesesuaian** laporan keuangan dengan **dokumen pendukung**
 - Kesesuaian realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan pada bendahara penerimaan dan bukti penyetoran ke Kas Daerah
 - Kesesuaian realisasi belanja dengan **bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ)** belanja daerah
 - Kesesuaian mutasi penerimaan/pengeluaran dan saldo kas daerah dengan rekening koran bank
 - Kesesuaian aset tetap yang dilaporkan dengan bukti kepemilikan / perolehan
4. **Kesesuaian** laporan keuangan dengan **fisik**
 - Kesesuaian realisasi belanja dan bukti pertanggungjawaban dengan prestasi pekerjaan
 - Kesesuaian saldo aset yang dilaporkan dengan bukti fisik aset (Cash Opname, BA Inventarisasi, dsb..)



- Cermati kebijakan efisiensi APBD
- lakukan inventarisir kegiatan hasil dari efisiensi APBD yang telah ditetapkan dalam APBD/P-APBD
- Pastikan bahwa semua pengeluaran selalu didukung dengan bukti bukti yang sah dan lengkap
- Pastikan bahwa output kegiatan dalam keadaan darurat sesuai dengan usulan RKB (sumber BTT) dan keperluan mendesak sesuai dengan kriteria;
- Dalam hal ada penerimaan sumbangan/hibah dari perusahaan, masyarakat atau pihak lain, pastikan pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal ada pemberian hibah atau bantuan, pastikan diterima oleh penerima manfaat sesuai dengan regulasi;



HASIL EVALUASI LKPD PROV/KAB/KOTA



- Terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD:
 - ❖ tidak terealisasi,
 - ❖ tingkat capaian realisasinya tidak optimal,
 - ❖ tidak ditetapkan target pendapatan tetapi terealisasi, dan
 - ❖ tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD;
- Terdapat anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa SKPD:
 - ❖ tingkat capaian realisasinya tidak optimal,
 - ❖ dianggarkan tetapi tidak terealisasi, dan
 - ❖ tidak dianggarkan tetapi terealisasi;
- Masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum di setor ke kas daerah sampai 31 Desember;
- Masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum di setor ke kas daerah sampai 31 Desember dan merupakan saldo kas tahun-tahun sebelumnya pada bendahara pengeluaran;
- Masih terdapat utang kepada pihak ketiga tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan;



Lanjutan.....



- Terdapatnya utang bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan;
- Terdapat Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga;
- Terdapat Penyertaan modal pada perusahaan daerah yang tidak membawa kontribusi yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah;
- Terdapat kegiatan yang dianggarkan namun pelaksanaan kegiatan tersebut lokasinya dialihkan dan tidak dimasukkan dalam Perubahan Peraturan Daerah APBD TA berkenaan dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA berkenaan;
- Terdapat Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum yang bukan merupakan kewenangan Pemda terkait;
- Terdapat Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dari Setoran Perorangan/Lembaga yang seharusnya masuk pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Masih terdapat kesalahan penganggaran belanja barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan di belanja modal yang seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa;



RINCIAN SILPA

- **Pelampauan target PAD, Dana Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelampauan penerimaan pembiayaan daerah;**
- **Penghematan belanja;**
- **Sisa kegiatan-kegiatan lanjutan;**
- **Kewajiban (Hutang) kepada Pihak Ke-III (SP2D yang belum dicairkan, Pekerjaan yang sudah selesai tetapi belum dibayar);**
- **Uang titipan Pihak Ke-III;**
- **Uang ada di RKUD, Rek. Bendahara RSUD-BLUD,;**



ISUED STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SIKLUS	TITIK KRITIS
Perencanaan	Ketidak selarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD
Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga satuan untuk mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal b. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen Perencanaan & Penganggaran c. Kesalahan penganggaran (perangkat daerah tdk berbasis kinerja, KPA menganggarkan seperti PA, tdk sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai Kemnedagri 050-2020) d. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih lelang/tender membengkak. e. Standar satuan harga berubah-ubah atau melebihi standar harga satuan regional atau tdk sesuai harga pasar.
Pelaksanaan/ perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Kelebihan Pembayaran pada insentif PDRD atau tdk sesuai ketentuan; b. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang. c. Refocusing dan realokasi anggaran yg tdk konsisten dengan pelaksanaannya. d. Keterlambatan pelaksanaan lelang- padahal ada aturan lelang/kontrak dini-pengadaan dini, shg penyerapan anggaran rendah. e. Penjadwalan kegiatan/sub kegiatan tidak tepat sehingga harus merubah anggaran kas dan SPD. f. Pelaksanaan perjalanan dinas yg kurang memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas dan rasionalitas.



ISUED STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2)



SIKLUS	TITIK KRITIS
Penatausahaan/ akuntansi/pelaporan	<ol style="list-style-type: none">Penatausahaan persediaan pada RSUD dan Dinkes belum tertibKelemahan penguasaan akuntansi double entryPengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi belum sesuai & tdk optimalRekonsiliasi kas daerah dengan Kuasa BUD tidak teraturRekonsiliasi data BMD tidak tdk optimal – Sensus BMD?
Pemeriksaan	Reviu dan pemeriksaan Inspektorat tidak optimal, Tindak lanjut hasil temuan APIP, BPK belum optimal Hasil LHP : <ul style="list-style-type: none">- Belum menerima pendapatan dari pemakaian asset daerah.- Verifikasi belanja hibah belum tertib.- Kekurangan volume atas pekerjaan di Dinas.- Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.- Penyelesaian hutang kpd Pihak Ketiga (hutang TA sebelumnya) belum selesai-yg dpt mengganggu kinerja dan tujuan kegiatan Pemda
Pertanggungjawaban	Keterlambatan jadwal dan tahapan penetapan ranperda ttg pertanggungjawaban-



PENYEBAB LAMBATNYA REALISASI BELANJA SERTA SOLUSI PERCEPATAN PENYERAPAN DALAM APBD TA 2025



PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2025

- 1 Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), seharusnya paling lambat 15 hari setelah Perkada APBD disahkan.
- 2 Pelaksanaan Lelang Terlambat, Umumnya Proses Lelang Baru Dimulai Pada Bulan April Dan Bahkan Ada Yang Baru Dimulai Pada Bulan Agustus Atau September
- 3 Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pada Tahun Anggaran Yang Sama Dengan Kegiatan Fisik, Sehingga Apabila Pelaksanaan DED Terlambat Menyebabkan Kegiatan Fisik Menjadi Terlambat
- 4 Keterlambatan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- 5 Keterlambatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga
- 6 Kegiatan Dengan Penunjukan Langsung Terlambat Dilaksanakan Karena Sering Terjadi Perubahan Lokasi Kegiatan
- 7 Penagihan Kegiatan Dilakukan Pada Akhir Tahun Anggaran, Tidak Per Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan



PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2025

Lanjutan...

- 8 Ketakutan dan kekhawatiran ASN berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
- 9 Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- 10 Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
- 11 Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dan Satuan Kerja Daerah;
- 12 Pada beberapa daerah, setiap akan melaksanakan kegiatan kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah.



SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

- 1 Percepatan pengesahan DPA paling lambat 15 hari setelah pengesahan perkada APBD
- 2 Melakukan Pengadaan Dini Dimulai Akhir Bulan Agustus Tahun Sebelumnya Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS Ditandatangani Kepala Daerah Dan Pimpinan DPRD.
- 3 Percepatan Belanja Melalui E-katalog, E-katalog Lokal, Toko Daring Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- 4 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Menggunakan Tahun Anggaran.
- 5 Percepatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga.
- 6 Percepatan Pelaksanaan DED Pada Awal Tahun, Diikuti Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik.
- 7 Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga Berdasarkan Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan.
- 8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang/Jasa.

3



SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

Lanjutan...

- 9 Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi, baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat secara periodik.
- 10 Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran.
- 11 Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- 12 Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 13 Mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan.
- 14 Meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK



TERIMA KASIH

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA





MATERI

Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD

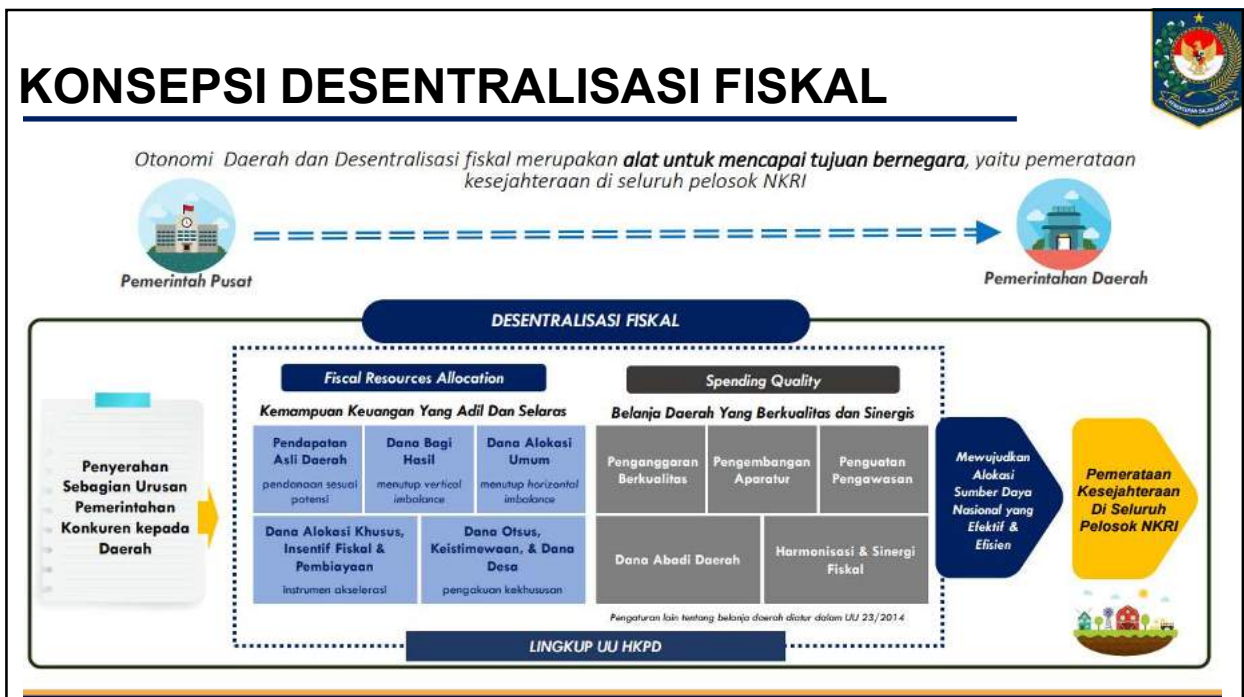
Rino Rio Kent, S.STP., MM.
(Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

TRANSFORMASI PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT



TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL



Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal <ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%) Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal 	Struktur belanja daerah yang belum memuaskan <ul style="list-style-type: none"> Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan) Dominasi belanja pegawai (32,4%) Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)
Local tax ratio masih cukup rendah <p>Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun local tax ratio tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi</p>	Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan KPBU masih terbatas Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000);
Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal <p>Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.</p>	

BELUM MERATA NYA LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

IPM
Capaian Tertinggi
• Kota Yogyakarta (86,61%)
Capaian Terendah
• Kab. Nduga (31,55)

Nasional 71,94

Akses Air Minum Layak
Capaian Tertinggi*
• Kota Magelang (100,00%)
Capaian Terendah
• Kab. Lanny Jaya (1,06%)

Nasional 89,27%

APM SMP/SMA
Capaian Tertinggi
• Kab. Humbang Hasundutan (90,38%)
Capaian Terendah
• Kab. Intan Jaya (13,34%)

Nasional 70,68%

Sumber: BPS (2019-2020)

REFORMASI FISKAL



Bonus demografi menjadi momentum untuk penguatan fondasi dan daya saing melalui reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal



- Mendorong penciptaan lapangan kerja
 - Memudahkan pembukaan usaha baru
 - Mendukung pemberantasan korupsi
- Peningkatan ekosistem investasi
 - Perizinan berusaha
 - Ketenagakerjaan
 - Dukungan UMKM
 - Kemudahan berusaha
 - Riset dan Inovasi
- Pengadaan tanah
 - Kawasan ekonomi
 - Investasi pemerintah pusat & percepatan PSN
 - Administrasi pemerintahan
 - Pengenaan sanksi
- Pasar keuangan yang mendalam: **DEPTH**
 - Sektor keuangan yang dapat diakses secara luas: **ACCESS**
 - Sistem keuangan yang efisien, kuat, stabil: **EFFICIENCY**



PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Definisi

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan..

STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD



Restrukturisasi & integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk **mengurangi administrative & compliance cost** serta **optimalisasi pemungutan**, sedangkan skema opsen ditujukan untuk **penggantian** skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan

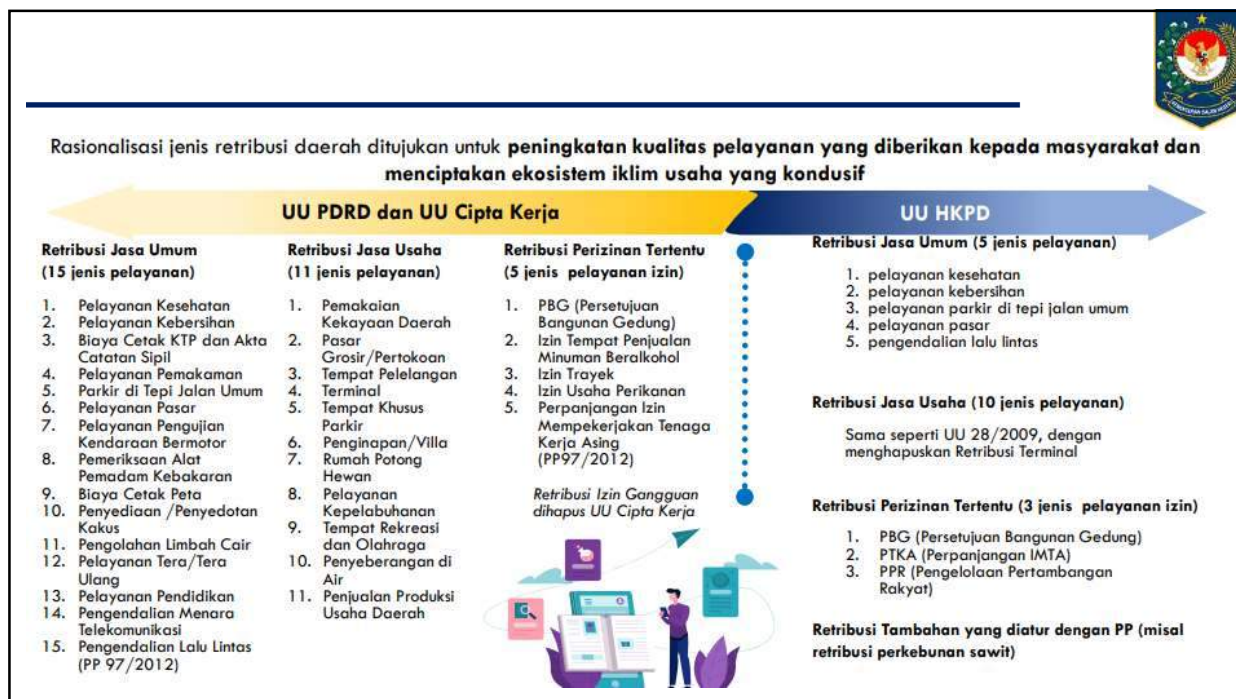
Undang-Undang 28 Tahun 2009

Provinsi	Kab/Kota
1. PKB	1. PBB P-2
2. BBNKB	2. Pajak Penerangan Jalan
3. PBBKB	3. Pajak Parkir
4. PAP	4. Pajak Hotel
5. Pajak Rokok	5. Pajak Restoran
	6. Pajak Hiburan
	7. BPHTB
	8. Pajak MBLB
	9. Pajak Reklame
	10. PAT
	11. Pajak Sarang Burung Walet


UU HKPD


Provinsi	Kab/Kota
1. PKB	1. PBB P-2
2. BBNKB	2. PBJT
3. PAB	3. BPHTB
4. PBBKB	4. Pajak MBLB
5. PAP	5. Pajak Reklame
6. Pajak Rokok	6. PAT
7. Opsen Pajak MBLB	7. Pajak Sarang Burung Walet
	8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB





PERBANDINGAN TARIF PAJAK KABUPATEN/KOTA				
NO	JENIS PAJAK	UU 28/2009	UU 1/2022	KET
1.	PBB-P2	paling tinggi 0,3%	paling tinggi 0,5%	Tarif maksimum naik, namun diberikan diskresi bagi Pemda untuk melakukan set-up Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% s.d. 100% dari NJOP.
2.	BPHTB	paling tinggi 5%	paling tinggi 5%	Tetap
3.	PBJT			Pengelompokan beberapa jenis pajak. Tetap
a.	Makanan dan/atau Minuman	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
b.	Tenaga Listrik	- paling tinggi sebesar 10% - penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 3%. - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5%.	- paling tinggi 10%; - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.	Tetap
c.	Jasa Perhotelan	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
d.	Jasa Parkir	paling tinggi 30%	paling tinggi 10%	Penyesuaian untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

PERBANDINGAN TARIF PAJAK KABUPATEN/KOTA				
				
NO	JENIS PAJAK	UU 28/2009	UU 1/2022	KET
e.	Jasa Kesenian dan Hiburan	- paling tinggi 35% - Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75% - Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10%.	- paling tinggi 10%; - Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)	Terdapat penyesuaian.
4.	Pajak Reklame	paling tinggi 25%	paling tinggi 25%	Tetap
5.	PAT	paling tinggi 20%	paling tinggi 20%	Tetap
6.	Pajak MBLB	paling tinggi 25%	paling tinggi 20%	Terdapat penurunan tarif karena mengakomodir Opsen MBLB.
7.	Pajak Sarang Burung Walet	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
8.	Opsen PKB	-	66% dari PKB	penerimaan Kab/kota yang dimaksudkan sebagai pengganti
9.	Opsen BBNKB	-	66% dari BBNKB	(shifting) bagi hasil PKB dan BBNKB

POINTER PENYESUAIAN TARIF PAJAK	
	
Pajak Kabupaten/Kota:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada perubahan tarif untuk BPHTB, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung Walet. 2. Terdapat kenaikan tarif PBB-P2, namun diberikan diskresi bagi Pemda untuk melakukan <i>set-up</i> Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% s.d. 100% dari NJOP. 3. Terdapat pengelompokan untuk jenis barang jasa tertentu yang terdiri dari makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 4. Terdapat penurunan tarif Pajak MBLB karena adanya kebijakan opsen yang diharapkan tidak membebani wajib pajak. 5. Penambahan Objek Pajak yaitu Opsen PKB dan MBLB yang merupakan pengganti bagi hasil PKB dan BBNKB. 	



RESTRUKTURISASI RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan)

1. pelayanan kesehatan
2. pelayanan kebersihan
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. pelayanan pasar
5. pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan)

1. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Pasar Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Tempat Khusus Parkir
6. Penginapan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Pelayanan Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Penyeberangan di Air
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. PTKA (Perpanjangan IMTA)
3. PPR (Pengelolaan Pertambangan Rakyat)

Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk **peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.**

Retribusi Daerah bersifat **closed list** yaitu tidak dapat dilakukan penambahan oleh Pemerintah Daerah diluar yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022.

Namun, penambahan jenis retribusi **dimungkinkan dengan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah** sesuai amanat Pasal 88 ayat (8) UU No. 1 Tahun 2022.

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Jasa Umum

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Jasa Usaha

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Perizinan Tertentu

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENENTUAN TARIF RETRIBUSI

- Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- Penetapan Peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.



1

Badan Layanan Umum Daerah

- ❑ Pelayanan yang diberikan oleh BLUD merupakan bagian dari objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan layanan yang dihasilkan.
- ❑ Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❑ Perkada disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek, misal:

RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst



2

Pemanfaatan Aset Daerah

Salah satu onjek retribusi jasa usaha adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dengan Perkada.
- Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Perkada, dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- Penetapan Perkada dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

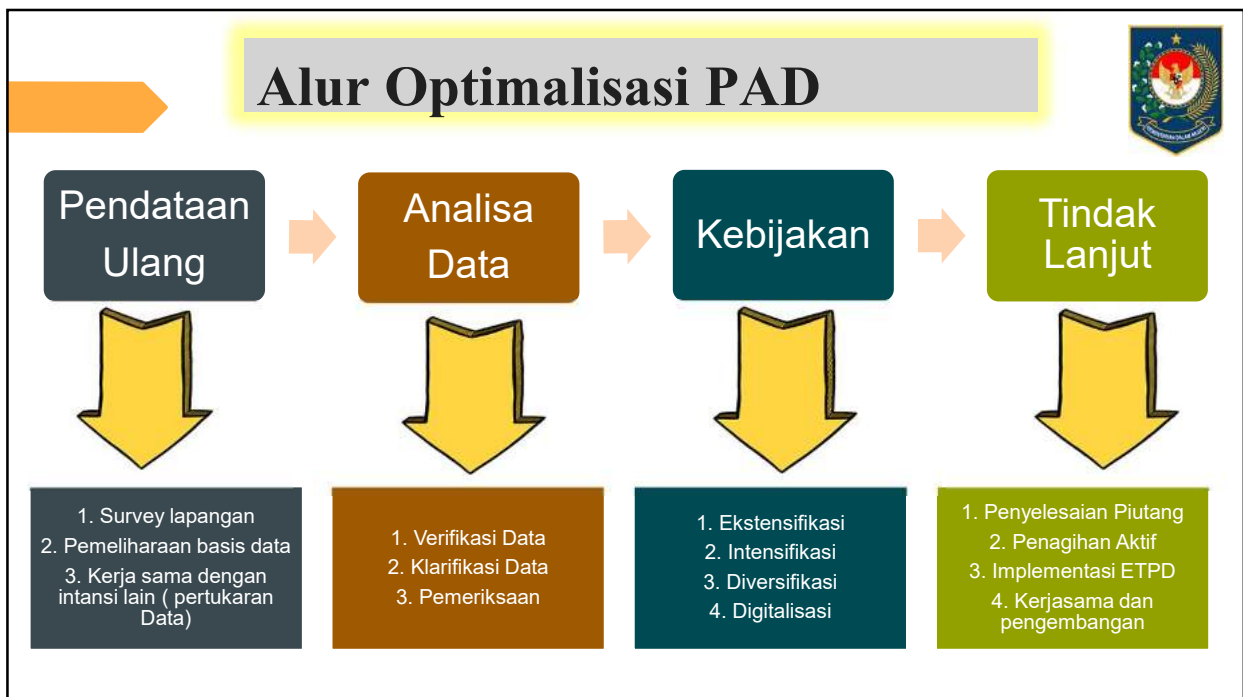
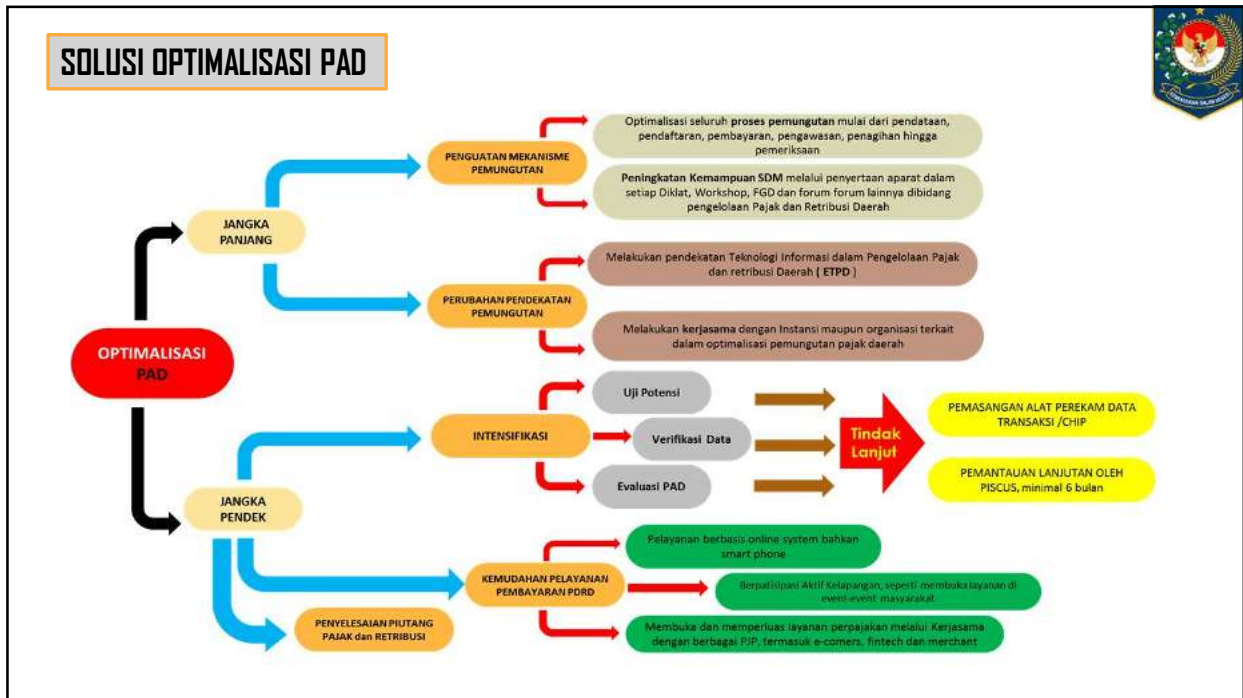


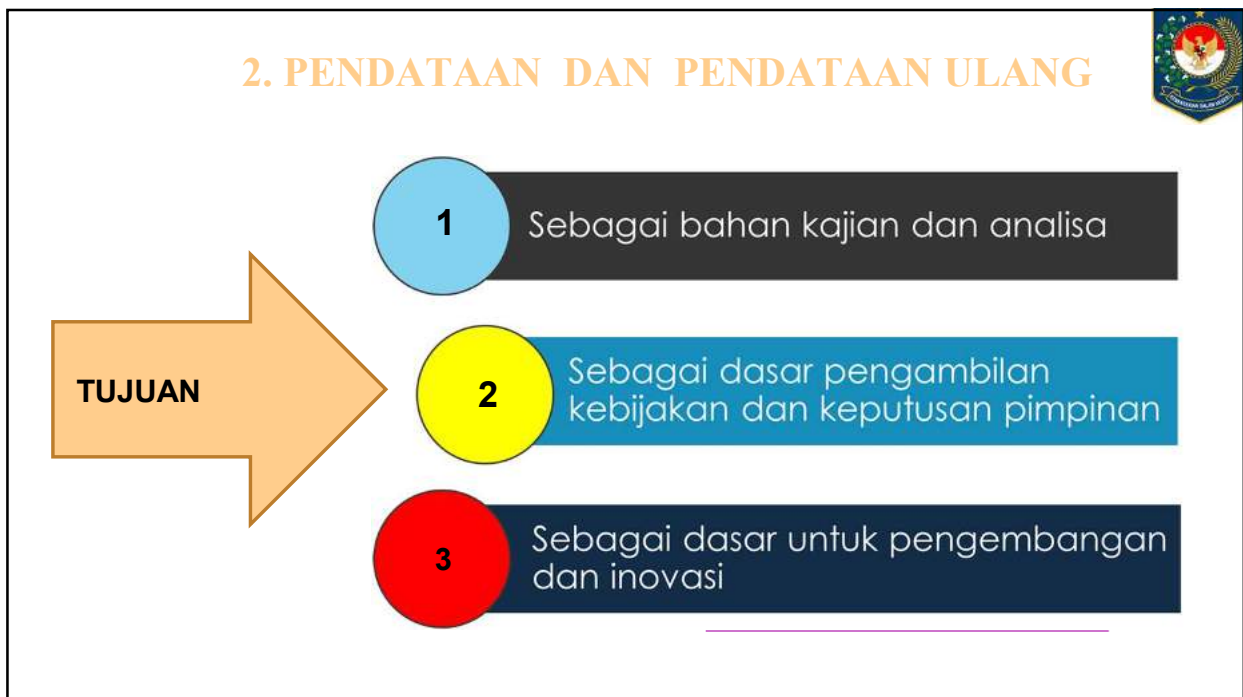
3

Kerja Sama dalam Pemungutan Retribusi

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga, tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.








3. SUSUN RENCANA INOVASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS **TEKNOLOGI (MASTERPLAN IT)** DILANJUTKAN DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI DALAM Mendukung PENGELOLAAN PAJAK /RETRIBUSI YANG MODERN, SESUAI DENGAN **PROSES BISNIS** YANG TELAH DI BUAT



10

4. KEMUDAHAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK dan RETRIBUSI DAERAH



- 1 Pelayanan berbasis online system bahkan smart phone
- 2 Jemput Bola Kelapangan, bahkan membuka layanan di event-event masyarakat
- 3 Membuka Kerjasama dengan OPD, Instansi, berbagai PJP, termasuk e-comers, fintech dan merchant

5. PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



- 1. Rekonsiliasi 1 bulan sekali untuk memantau pendapatan PDRD dan pelaporannya, serta mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi OPD, dipimpin oleh Kepala Bapenda.
- 2. Rapat Evaluasi pendapatan Pajak dan retribusi per OPD setiap TriWulan dipimpin oleh Sekertaris Daerah.
- 3. Rapat evaluasi per Semester dipimpin oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

1
2

6. PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT

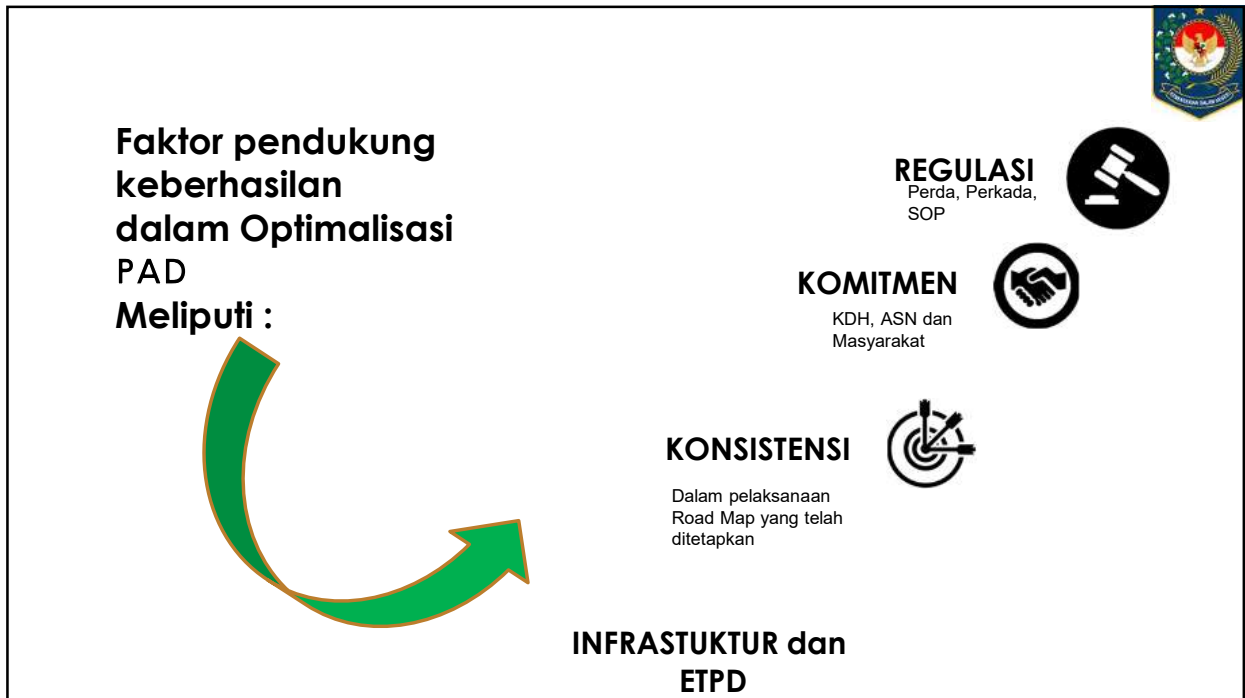


PEMBERITAHUAN
OBJEK PAJAK INI BELUM
DILUNASI/DIBAYAR PAJAKNYA
OLEH WAJIB PAJAK

PERINGATAN
MEDIA PROMOSI
BELUM MEMBAYAR PAJAK DAERAH

HUBUNGI:
DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
BIDANG PENGENDALIAN
TELP. 022-453852 EXT. 1

1
3



5. ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH

26

This block contains a colorful illustration of financial and business symbols such as pie charts, a laptop, a thumbs-up icon, and a rising arrow. To the right of the illustration is the section title '5. ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH' and the page number '26' in the bottom right corner.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

ALTERNATIF PEMBIAYAAN

- PAD
- DANA TRANSFER
- BUMD
- BLUD
- PEMANFAATAN BMD
- PINJAMAN DAERAH, OBLIGASI, SUKUK
- KPDBU
- CSR
- ANGGARAN K/L

DANA BAGI HASIL

PENGERTIAN

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil, dengan tujuan **untuk** mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

PENGELOLAAN

- ✓ Memperhatikan **kinerja** dukungan **penerimaan negara** dan **pemulihan ekonomi**;
- ✓ Penggunaannya sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (misalnya: JKN, reboisasi, CHT, dsb);
- ✓ Pengalokasian berdasarkan **realisasi T-1**;
- ✓ Dialokasikan kepada:
 - daerah penghasil;
 - daerah **pengolah**, dan
 - Daerah non penghasil yang berbatasan **langsung** dengan **daerah penghasil**;

JENIS DBH

<p>PAJAK</p> <ul style="list-style-type: none"> PB B PP h CH T 	<p>SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> KEHUTANA MINERBA MIGAS PANAS BUMI PERIKANAN
<p>DBH PERKEBUNYAN SAWIT</p>	

ALOKASI DBH BERDASARKAN UU NO. 1/2022

JENIS PENERIMAAN NEGARA YANG DIBAGIHASILKAN	UU No. 1/2022 (dalam %)					
	Pusat	Prov	Daerah Penghasil	Daerah Pengolah	Pemerataan	
					Berbatasan Langsung	Daerah Lainnya
PPh Pasal 21 dan 25/29	80	7.5	8.9			3.6
Pajak Bumi dan Bangunan	0	16.2	73.8			10
Cukai Hasil Tembakau	97	0.8	1.2			1
Kelapa Sawit	96	0.8	2.4		0.8	
Minyak Bumi						
Darat - Laut <4 Mil	84.5	2	6.5	1	3	3
4 Mil <Laut <12 Mil	84.5	5		1		9.5
Gas Bumi						
Darat - Laut <4 Mil	69.5	4	13.5	1	6	6
4 Mil <Laut <12 Mil	69.5	10		1		19.5
Mineral dan Batubara						
Iuran Tetap						
Darat - Laut <4 Mil	20	30	50			
4 Mil <Laut <12 Mil	20	80				
Iuran Produksi (Royalti)						
Darat - Laut <4 Mil	20	16	32	8	12	12
4 Mil <Laut <12 Mil	20	26		8		46
Kehutanan						
IIUPH	20	32	48			
PSDH	20	16	32		16	16
Dana Reboisasi	60	40				
Panas Bumi	20	16	32	8	12	12
Perikanan	20		80			

DANA ALOKASI UMUM

Defenisi

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Penetapan Pagu DAU Nasional

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

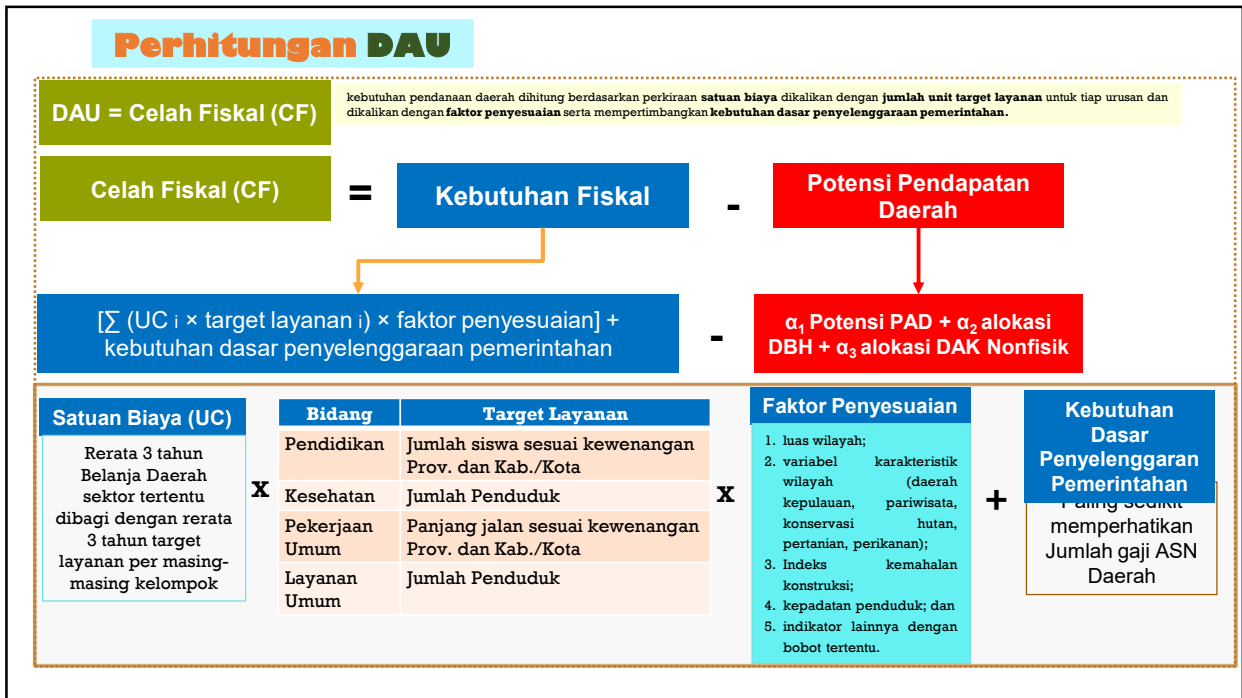
- a. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. kemampuan Keuangan Negara;
- c. pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d. target pembangunan nasional.

Pengalokasian DAU

1. DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan untuk provinsi dan kab/kota, berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran;
2. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah;
3. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kab/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kab/kota.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FAKTOR PENYESUAIAN DALAM

Kebutuhan Fiskal (KbF) = $\sum (UC_i \times \text{target layanan } i) \times \text{Faktor Penyesuaian}$ + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relative membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya.

- ❑ Masing2 Faktor Penyesuaian di index-kan dan di normalisasi menjadi index normal dari yang terkecil 1 sampai dengan yang terbesar 2 pada masing2 Kelompok Perhitungan;
- ❑ Indeks Faktor Penyesuaian dijumlahkan dengan bobot tertentu menjadi Index Komposit Faktor Penyesuaian;

FAKTOR PENYESUAIAN					
IKK	Densitas Penduduk	Daerah Kepulauan	Daerah Pariwisata	Daerah Ketahanan Pangan	Daerah Konservasi Hutan
<i>Indeks Kemalahan Konstruksi, dari BPS</i>	Jumlah Penduduk dibagi Luas Wilayah, sumber data dari Kemendagri	Luas Wilayah Laut, data bersumber dari BIG	Indeks Pariwisata dari Kemenparekraf	(Indeks pertanian dan perikanan, dari Kementan dan Kemen Kelautan Perikanan)	(Indeks luas lahan tutupan hutan, dari Kemen LHK)
BOBOT PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN					
50%	5%	10%	10%	10%	15%

Contoh perhitungan indeks penyesuaian Provinsi Aceh:

	IKK	Densitas	Kepulauan	Pariwisata	Ketahanan Pangan	Konservasi Hutan	Indeks Komposit
Data awal	100,59	94,65	43.659,02	6,46	0,03	0,56	1,53
Indeks Normalize	1,40	1,11	1,42	1,61	1,72	2,00	

Indeks Normalize = ((nilai indeks daerah – nilai indeks minimal dalam kelompok) / (nilai maksimal - nilai minimal)) + 1
 Contoh Indeks Normalize IKK Provinsi Aceh = ((100,59 – 90,46) / (115,97 – 90,46)) + 1 = (10,13 / 25,51) + 1 = 1,40

DATA DASAR DAU TA 2025

Kebutuhan Fiskal	Realisasi Belanja per Urusan	2021 sd. 2023*		Kemenkeu
	Jumlah Siswa	2021 sd. 2023*	→	Kemendikbud
	Jumlah Penduduk	2022 sd. 2024	→	Kemendagri
	Panjang Jalan	2021 sd. 2023*	→	Kemen PUPR
Kebutuhan Dasar Pemerintahan	Belanja Pegawai	2024	→	Kemenkeu
	Formasi Calon ASND	2024	→	KemenPANRB
Faktor Penyesuaian	Luas Laut	2023*	→	BIG
	IKK	2024	→	BPS
	Densitas	2024	→	Kemendagri
	Indeks Daerah Ketahanan Pangan	2024	→	Kementan & Kemen KP
	Indeks Daerah Tutupan Hutan	2023*	→	Kemen LHK
Potensi Pendapatan	Indeks Daerah Pariwisata	2024	→	Kemenparekraf
	Potensi PAD	2024	→	Kemenkeu
	DBH	2024	→	Kemenkeu
	DAK Nonfisik	2024	→	Kemenkeu

DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

1 DAK Fisik

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2 DAK Non Fisik

DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

3 Hibah kepada Daerah

- digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- bersumber dari:
 - penerimaan dalam negeri;
 - pinjaman luar negeri; dan/atau
 - hibah luar negeri.
- diberikan dalam bentuk uang.
- Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk **selain uang**;
- Hibah dalam bentuk **selain uang** dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Thanks!



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA



MATERI

Komunikasi Publik dan *Media Handling*

Berlian Thaeba Noevus, C.PS.
(Public Speaking Trainer)

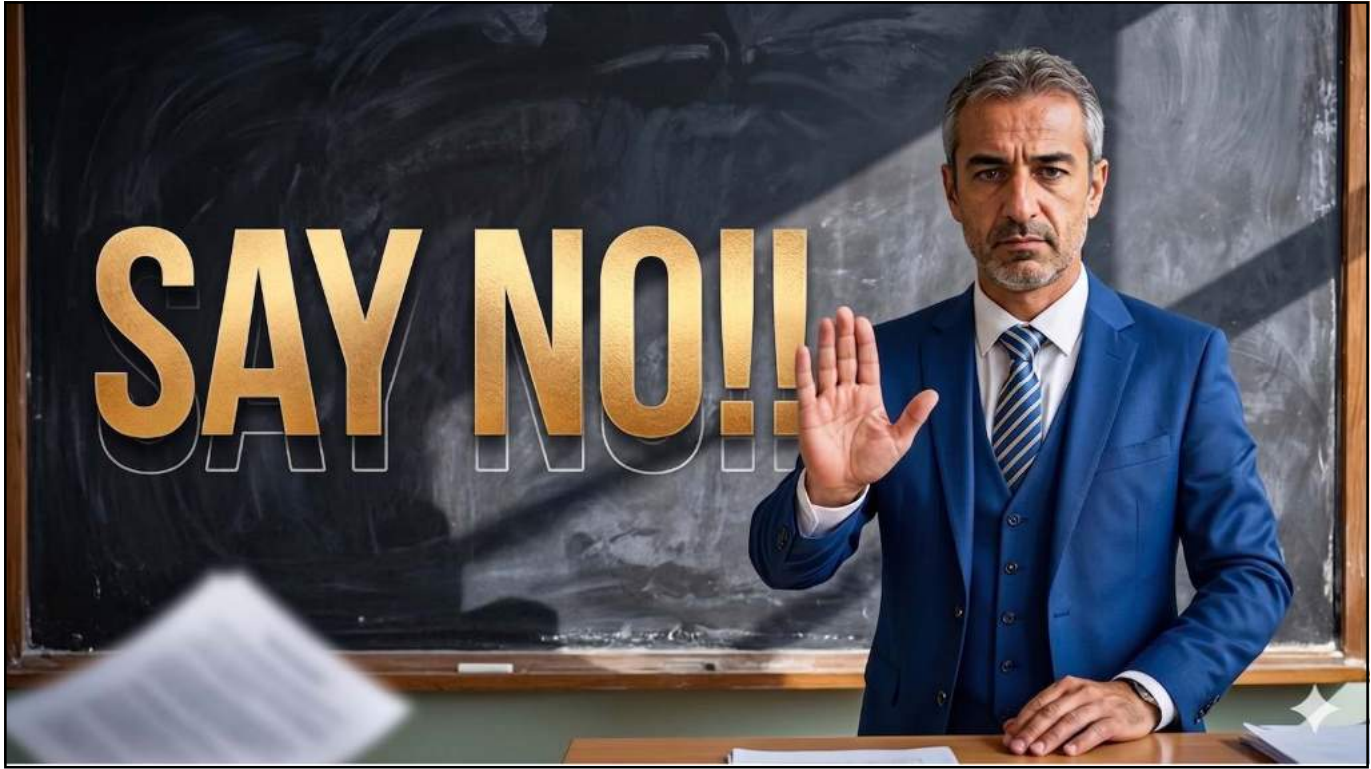
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**



Public Speaking & Media Handling
With DPRD Purbalingga.
13 Mei 2026.
Tunjukkan Suaramu!

-  Kemampuan Pidato
-  Interaksi Media
-  Komunikasi Publik
-  Perwakilan Rakyat

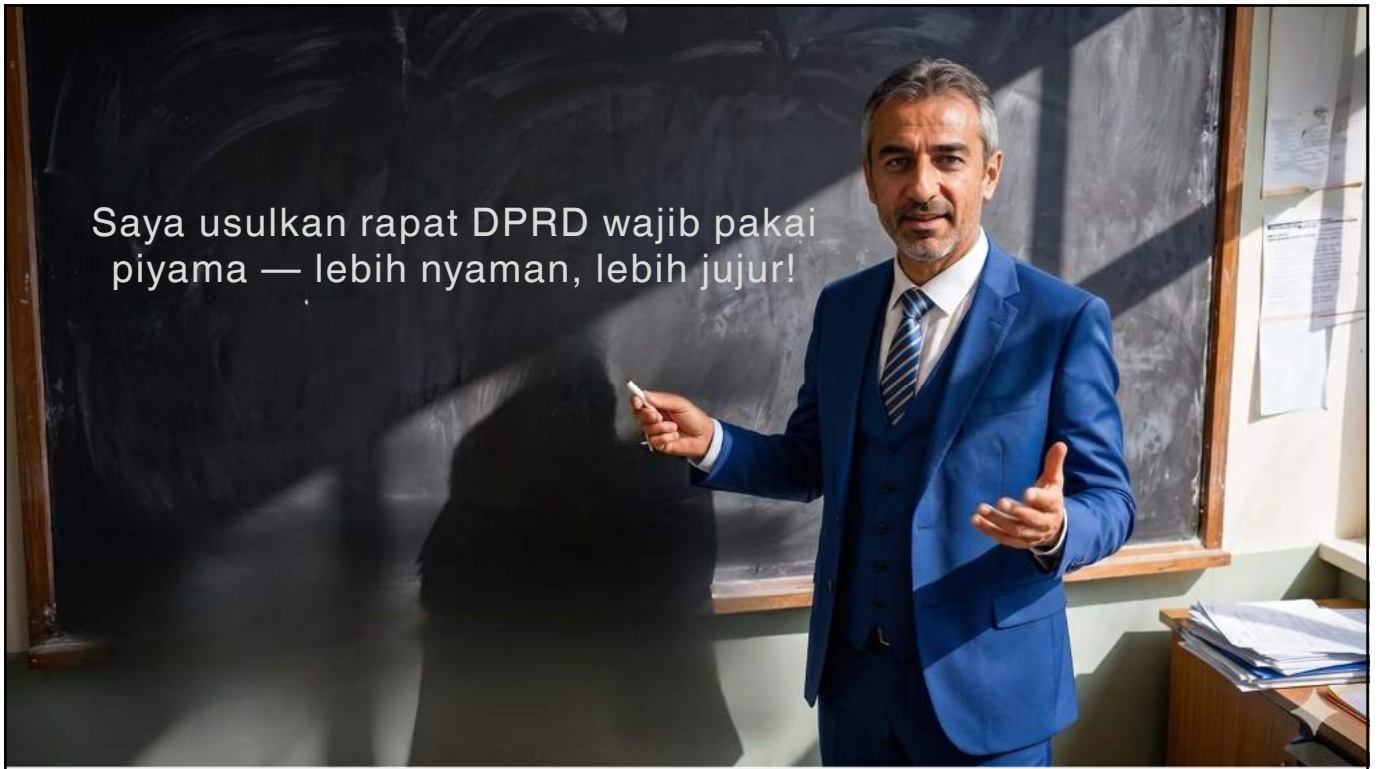
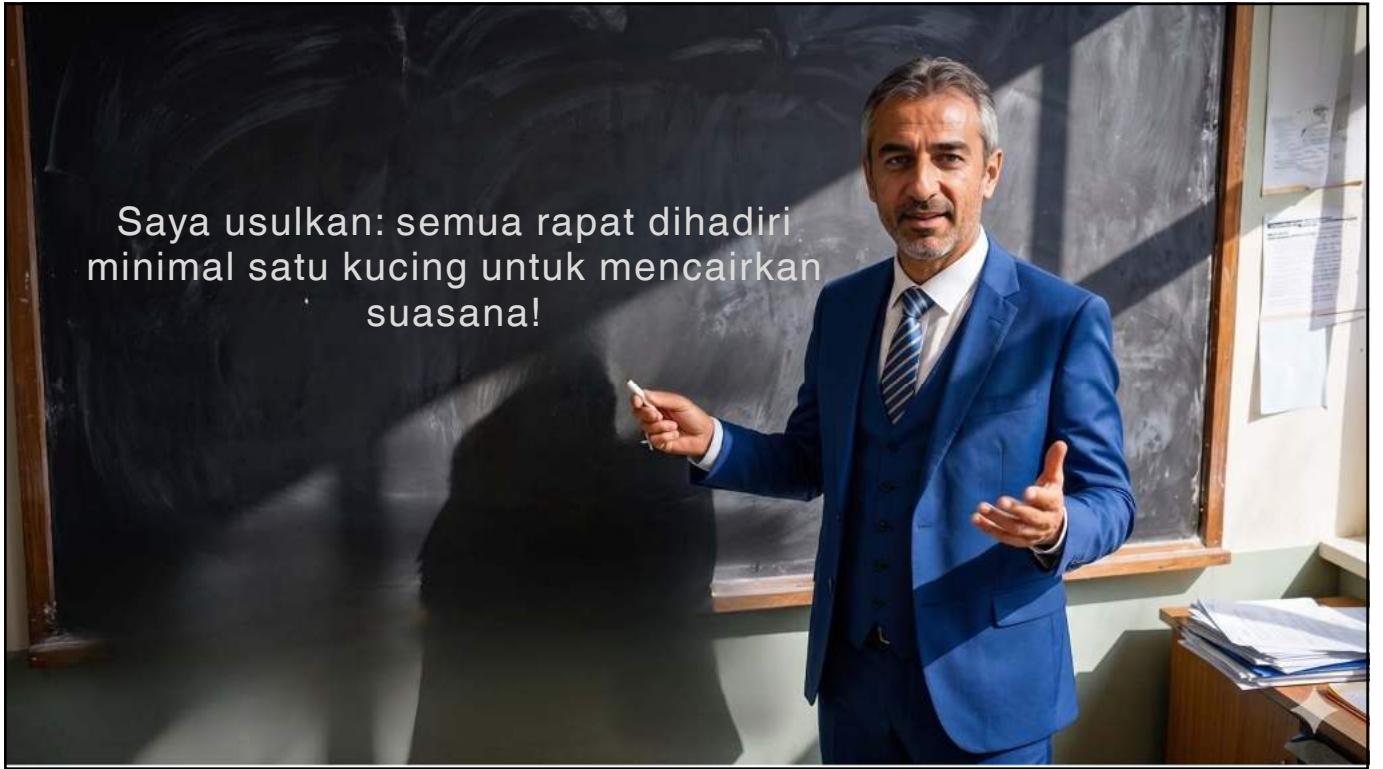


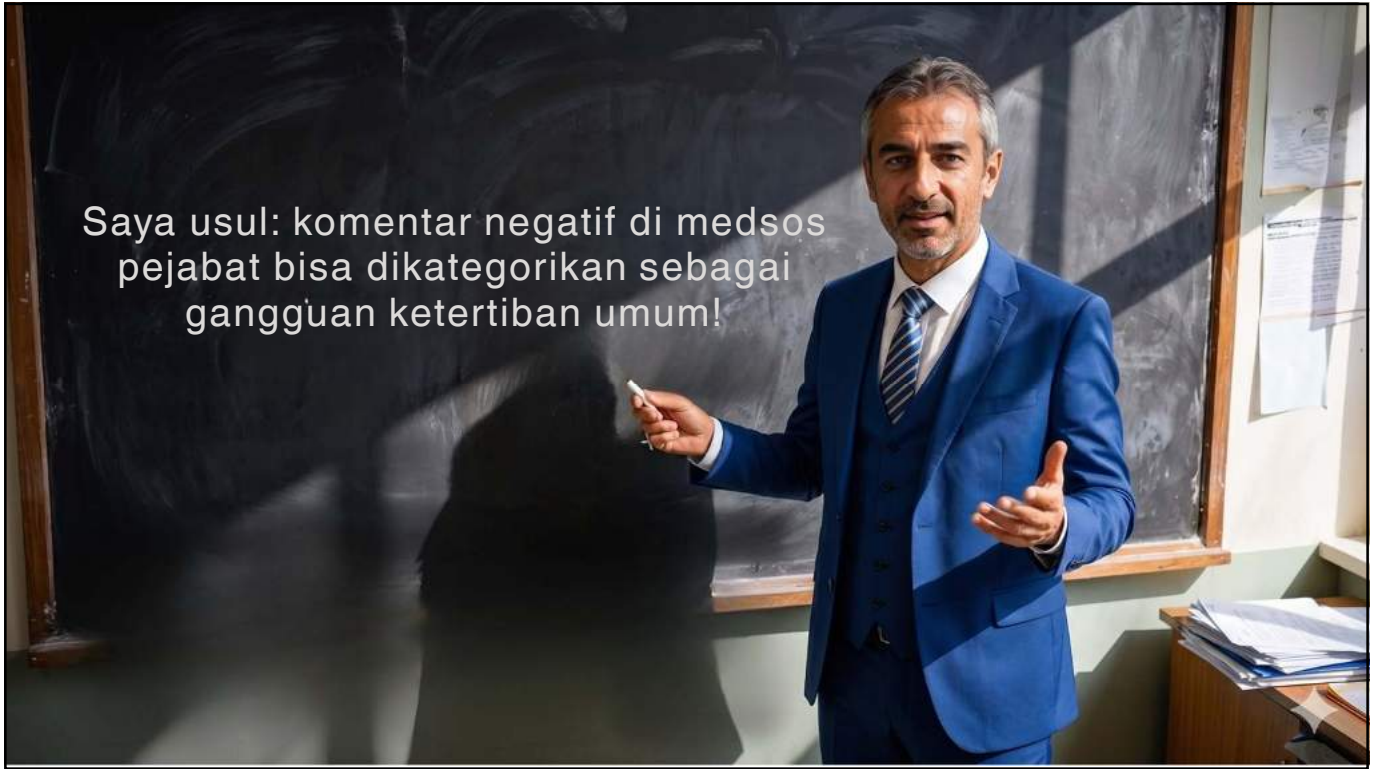
SAY NO!!!



**VIDEO START IN
3 . 2 . 1 . .**









BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA



MATERI

Focus Group Discussion (FGD)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**



A. Pendahuluan

1. Umum

Berikut adalah laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang dilaksanakan di Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta perangkat terkait dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian penting dalam mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat, efektif, dan berkualitas.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, yang dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas yang dihadiri oleh 49 peserta terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

C. Hasil yang Dicapai

Focus Group Discussion (FGD) ini menggunakan metode ceramah diikuti diskusi interaktif antara pimpinan dan peserta dan dipandu oleh moderator Sdri. Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos.

Adapun hasil dari Focus Group Discussion (FGD) adalah sebagai berikut :

1. Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Materi pembahasan dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek penting terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), antara lain:

- a. Dasar Hukum Penyusunan LKPD dan Raperda
 - Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan LKPD dan Raperda.
 - Sinkronisasi kebijakan keuangan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat.
- b. Struktur Dokumen LKPD
 - Komponen utama laporan keuangan daerah, meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - Penyajian data keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.
- c. Tahapan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD
 - Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data, rekonsiliasi, penyusunan draft, hingga pembahasan bersama DPRD.
 - Mekanisme harmonisasi dan evaluasi Raperda sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
 - Penyesuaian kebijakan akuntansi daerah terhadap standar nasional.
- e. Optimalisasi Kualitas LKPD
 - Strategi peningkatan kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini terbaik dari BPK.
 - Penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan administrasi keuangan daerah.
- f. Permasalahan dan Solusi dalam Penyusunan LKPD
 - Identifikasi kendala teknis maupun administratif dalam penyusunan laporan keuangan.
 - Penyampaian solusi, praktik baik, dan langkah percepatan penyelesaian dokumen Raperda.
- g. Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan LKPD
 - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung ketepatan waktu dan validitas data laporan keuangan.
 - Peran DPRD dan TAPD dalam proses pembahasan dan evaluasi Raperda LKPD.

Melalui pembahasan materi ini diharapkan peserta mampu memahami struktur penyusunan Raperda LKPD secara komprehensif, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

2. Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD

Materi pembahasan dalam kegiatan ini difokuskan pada upaya memperkuat sinergi kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), meliputi:

- a. Kebijakan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan APBD
 - Arah dan strategi kebijakan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
- b. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal
- Kontribusi PAD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
 - Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - Keterkaitan PAD dengan Penyusunan LKPD
 - Pengaruh capaian PAD terhadap kualitas dan akurasi laporan keuangan daerah.
 - Penyajian pendapatan daerah dalam komponen LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- c. Strategi Optimalisasi PAD
- Penguatan sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah.
 - Pemanfaatan digitalisasi dan inovasi pelayanan pajak serta retribusi daerah.
 - Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan.
- d. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan PAD
- Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - Penguatan pengendalian internal untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD.
- e. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengelolaan PAD
- Kendala administrasi, regulasi, dan validitas data pendapatan daerah.
 - Upaya penyelesaian dan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan PAD.
- f. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah
- Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan PAD dan penyusunan LKPD.
 - Mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

g. Peningkatan Kualitas LKPD melalui Sinergi Kebijakan

- Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan DPRD dalam penyusunan laporan keuangan.
- Upaya mempertahankan dan meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Melalui pembahasan materi ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya sinergi kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi PAD dalam mendukung penyusunan LKPD yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komunikasi Publik dan *Media Handling*

Materi pembahasan dalam kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membangun komunikasi publik yang efektif serta memahami strategi penanganan media (media handling) secara profesional, meliputi:

a. Konsep Dasar Komunikasi Publik

- Pengertian dan fungsi komunikasi publik dalam pemerintahan dan kelembagaan.
- Pentingnya komunikasi yang informatif, transparan, dan membangun kepercayaan masyarakat.

b. Strategi Komunikasi yang Efektif

- Teknik menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami publik.
- Penyusunan pesan komunikasi yang tepat sasaran dan berorientasi pelayanan publik.

c. Peran Media Massa dan Media Digital

- Pemanfaatan media cetak, elektronik, dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi.
- Membangun hubungan yang baik dengan insan pers dan media.

d. Media Handling dan Manajemen Informasi

- Teknik menghadapi wawancara, konferensi pers, dan penyampaian pernyataan resmi.
- Pengelolaan informasi publik agar tetap akurat, cepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

e. Etika Komunikasi dan Kehumasan

- Penerapan etika komunikasi dalam interaksi dengan masyarakat dan media.
- Menjaga citra dan kredibilitas lembaga melalui komunikasi yang profesional.

f. Manajemen Krisis Komunikasi

- Strategi menghadapi isu, kritik, dan pemberitaan negatif.
- Langkah-langkah penanganan krisis komunikasi secara cepat, tepat, dan terukur.

g. Public Speaking dan Teknik Penyampaian Pesan

- Peningkatan kemampuan berbicara di depan publik.
- Teknik membangun kepercayaan diri, penguasaan materi, dan bahasa tubuh yang efektif.

h. Optimalisasi Media Sosial dalam Komunikasi Publik

- Pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi publik.
- Strategi menciptakan konten yang edukatif, informatif, dan responsif terhadap masyarakat.

Melalui pembahasan materi ini diharapkan peserta mampu meningkatkan kemampuan komunikasi publik, membangun hubungan yang baik dengan media, serta menciptakan penyampaian informasi yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Penutup

Demikian Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah dilaksanakan dengan baik, lancar, dan penuh partisipasi aktif dari seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan keuangan daerah, penguatan optimalisasi PAD, serta penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai masukan, saran, dan hasil diskusi yang telah disampaikan selama FGD menjadi bahan yang sangat berharga dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan penguatan fungsi pengawasan serta perencanaan daerah ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber, pimpinan, peserta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat ditindaklanjuti secara nyata demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



FOTOCOPY SERTIFIKAT



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10459/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 096/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.**

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10460/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 098/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ARIS WIDIARSO, S.H.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10461/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 099/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10462/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 100/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **IMAWAN TAQIUDIN**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10463/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 101/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **KARSENO, S.H., M.M.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10464/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 102/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. TONGAT, S.H., M.M.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10465/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 103/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ERNI WIDYAWATI, S.Sos.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10466/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 104/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **WURIYATI, A.Md.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10467/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 105/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **BAYU WIDYATAMA**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10468/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 106/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **USWATUN KHASANAH**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10469/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 107/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ANDHIKA WISNU MOYO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10470/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 108/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10471/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 109/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **NURANI DIAH PERMATASARI**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10472/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 110/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **AGUS PRIYANTO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10473/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 111/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. KATNO, S.T.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10474/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 112/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SLAMET**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10475/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 113/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Drs. LUKMANUDIN**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10476/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 114/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MISWANTO, M.Pd.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10477/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 115/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. HAMID, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “**Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10478/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 116/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PUPUT ADI PURNOMO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “**Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10479/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 117/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10480/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 118/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10481/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 119/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. ERLIYATI, S.E.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10482/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 120/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. SAHLAN**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10483/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 121/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **CAHYO SUSILO, A.Md., RO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10484/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 122/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUMARSIH, S.IP., M.Pd.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/10485/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 123/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SITI SIFA, S.Pd.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10486/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 124/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **NIKEN HINDRIANINGSIH**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10487/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 125/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PADANG KUSUMO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10488/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 126/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **DIDIK SUPRAYOGI, A.Md**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10489/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 127/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. AKHMAD SA'BANI, S.E.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10490/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 128/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **TEGUH DWIYANTO, S.T.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10491/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 129/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **ADI SUPRIYANTO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10492/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 130/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **UUT TRIAS YANUAR**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “**Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10493/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 131/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **IDRUS ANJASMORO, A.Md**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10494/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 132/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10490/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 133/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Hj. YUNIARTI, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10496/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 134/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MUGI WAHYUDI, S.AP**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10497/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 135/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10498/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 136/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10499/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 137/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SARJONO, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10500/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 138/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **Drs. H. MUGO WALUYO**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10501/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 139/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUHARTO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10502/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 140/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **MUSOFAN, S.Si.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10503/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 141/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. IN'AM BIROHMATILLAH**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10504/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 142/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **LIA MAHFUROH, A.Md.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10505/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 143/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **SUNARKO, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10506/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 144/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **PREDI SETIAJI, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM

: 893.3.33/10507/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI

: 145/SF/BTK/REK-UNAKI/2026

Diberikan kepada :

Nama : **H. KHODIRIN, S.H.**

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 14 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101

DAFTAR MATERI PENDALAMAN TUGAS

NOMOR	MATERI PENDALAMAN TUGAS	JAM PELAJARAN
1.	STRUKTUR DAN PENYUSUNAN RAPERDA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	5
2.	SINERGI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD DALAM LKPD	5
3.	KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA HANDLING	5
4.	FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	5

Semarang, 14 Mei 2026

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas AKI



ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503



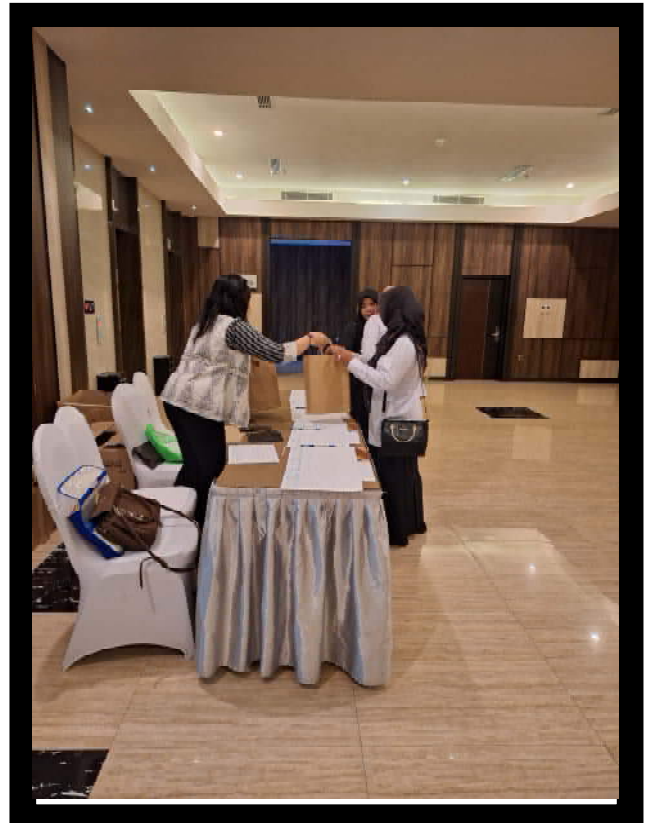
DOKUMENTASI



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”



Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

**“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”**

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

"Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

